

SKRIPSI

PENGARUH *FRAUD RISK ASSESMENT* DAN KECAKAPAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR INSPEKTORAT SULAWESI TENGGARA

YEHESKHIEL SESARIO MANGIRI



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI

PENGARUH *FRAUD RISK ASSESMENT* DAN KECAKAPAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR INSPEKTORAT SULAWESI TENGGARA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**YEHESKHIEL SESARIO MANGIRI
A31109115**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI

PENGARUH *FRAUD RISK ASSESMENT* DAN KECAKAPAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR INSPEKTORAT SULAWESI TENGGARA

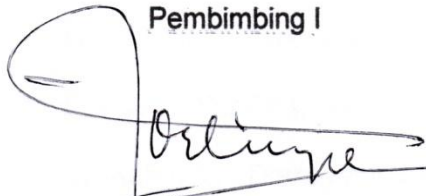
disusun dan diajukan oleh

**YEHESKHIEL SESARIO MANGIRI
A31109115**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 15 Oktober 2014

Pembimbing I



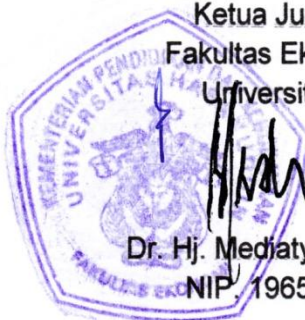
Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA
NIP. 195607221987021001

Pembimbing II



Drs. Muh. Nur Azis, MM
NIP. 196012311988111004

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 196509251990022001

SKRIPSI

PENGARUH *FRAUD RISK ASSESMENT* DAN KECAKAPAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR INSPEKTORAT SULAWESI TENGGARA

disusun dan diajukan oleh

**YEHESKHIEL SESARIO MANGIRI
A31109115**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **22 Januari 2015** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	T. Tangan
1.	Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA	Ketua	1.
2.	Drs. Muh. Nur Azis, MM	Sekretaris	2.
3.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., M.Soc.Sc., Ak., CA	Anggota	3.
4.	Drs. Mushar Mustafa, MM., Ak., CA	Anggota	4.
5.	Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si., Ak., CPA, CA	Anggota	5.



Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 196509251990022001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Yeheskhel Sesario Mangiri

NIM : A311 09 115

jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh *Fraud Risk Assesment* dan Kecakapan Auditor terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah pada Kantor Inspektorat Sulawesi Tenggara

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Oktober 2014

Yang membuat pernyataan,



Yeheskhel Sesario Mangiri

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia serta anugerah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun non-material dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua tercinta Bapak Yermias Mangiri, SH dan ibu Abigail serta Saudaraku Sugar Ray atas doa, kasih sayang, nasehat, serta motivasi yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., MS, Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
4. Bapak RM. Suryo Martono selaku Inspektur Kantor Inspektorat Sulawesi Tenggara atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
5. Ibu Hj. Nurhaeda, SH selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Inspektorat Sulawesi Tenggara yang senantiasa mendukung penelitian ini.
6. Bapak Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Drs. Muh. Nur Azis, MM selaku dosen pembimbing 2 atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan

memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

7. Bapak Drs. Syahrir, M.Si., Ak., CA selaku penasehat akademik yang telah membimbing peneliti selama kurang lebih 5 tahun dalam menjalani masa kuliah.
8. Ibu Dr. Hj. Mediaty SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
9. Bapak Dr. Yohanis Rura, SE., M.SA., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
10. Teman-teman K09NITIF yang sudah memberikan semangat dan bantuan kepada peneliti.
11. Kakak-kakak dan teman-teman PMKO atas doa dan dukungannya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Terima Kasih.

Makassar, 15 Oktober 2014

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh *Fraud Risk Assesment* dan Kecakapan Auditor terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah pada Kantor Inspektorat Sulawesi Tenggara

The Effect of Fraud Risk Assesment and Auditor Skills to Audit Quality Authorities in the Financial Inspectorate on the Provinces Inspectorate Southeast of Sulawesi

Yeheskhriel Sesarior Mangiri
Yulianus Sampe
Muhammad Nur Azis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *fraud risk assesment* dan kecakapan auditor terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada Kantor Inspektorat Sulawesi Tenggara. Sampel penelitian ini adalah aparat Inspektorat Sulawesi Tenggara yang melakukan pemeriksaan reguler. Data diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada 35 responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan *fraud risk assesment* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan kecakapan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi variabel *fraud risk assesment* dan kecakapan auditor terhadap kualitas audit sebesar 10,4%. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan variabel *fraud risk assesment* berpengaruh terhadap kualitas audit dan kecakapan auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan variabel *fraud risk assesment* dan kecakapan auditor memberikan sumbangan terhadap variabel kualitas audit sebesar 11,9%.

Kata kunci: *fraud risk assesment*, kecakapan auditor, kualitas audit

This research aimed to analyzed the effect of fraud risk assesment and auditor skills to audit quality authorities in the financial inspectorate on the Provinces Inspectorate Southeast of Sulawesi. Samples of this research is staffs of Southeast Sulawesi inspectorate who perform regular checks. Data were taken from questionnaires distributed to 35 respondents. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results showed that fraud risk assesment has no effect to audit quality. On other hand, result shows that auditor skills has some effect to audit quality. The coefficient of determination of variable fraud risk assesment and auditor skills to audit quality by 10.4 %. These results are different to previous research which showed variable fraud risk assesment has some effect to audit quality and auditor skills has no effect to audit quality. The coefficient of determination showed variable fraud risk assesment and auditor skills contribute to audit quality variables by 11.9%.

Keyword: *fraud risk assesment, auditor skills, audit quality*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoretis	5
1.4.2 Kegunaan Praktis	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Definisi Audit	8
2.1.2 Tujuan Audit	9
2.1.3 Jenis – jenis Audit.....	10
2.1.4 Fraud	11
2.1.4.1 Definisi Fraud	11
2.1.4.2 Tipe Fraud	14
2.1.4.3 Tanggung Jawab atas Fraud.....	15
2.1.4.4 Fraud Risk Asessment.....	16
2.1.4.5 Mengorganisasikan penilaian Risiko Fraud.....	17
2.1.5 Kecakapan Auditor	17
2.1.6 Kualitas Audit.....	19
2.1.7 Norma Pengawasan	20
2.1.7.1 Pokok – pokok Norma Pengawasan .	21
2.1.7.2 Pengelolaan Keuangan Daerah	24
2.1.7.3 Pengawasan Keuangan Daerah	26
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Penelitian	30
2.4 Hipotesis	31
 BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Rancangan Penelitian	33

3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.3	Populasi dan Sampel	33
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.6	Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7	Metode Analisis Data	38
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	39
3.7.2	Analisis Regresi Linear Berganda	39
3.7.3	Uji Hipotesis.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	41
4.1.1	Deskripsi Lokasi	41
4.1.2	Profil Inspektorat Sulawesi Tenggara.....	41
4.1.2.1	Struktur Organisasi	41
4.1.2.2	Fungsi Organisasi.....	44
4.1.3	Gambaran Umum Responden	44
4.1.4	Deskripsi Variabel Penelitian	46
4.1.4.1	Fraud Risk Assesment.....	46
4.1.4.2	Kecakapan Auditor	47
4.1.4.3	Kualitas Audit.....	48
4.2	Hasil Penelitian	48
4.2.1	Karakteristik Distribusi Responden	48
4.2.2	Uji Kualitas Data	49
4.2.2.1	Uji Validitas	49
4.2.2.2	Uji Realibilitas.....	50
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	51
4.2.3.1	Uji Normalitas.....	51
4.2.3.2	Uji Multikolineritas	53
4.2.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	54
4.2.4	Analisis Regresi Berganda.....	56
4.2.4.1	Uji Koefisien Determinasi	56
4.2.4.2	Uji Simultan (Uji F)	57
4.2.4.3	Uji Parsial (Uji t)	58
4.3	Pembahasan.....	59
BAB V	PENUTUP	64
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran	64
5.3	Keterbatasan Penelitian	65
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	35
4.1 Demografi Responden.....	45
4.2 Tanggapan Responden	46
4.3 Pengumpulan Data	49
4.4 Uji Validitas Variabel Penelitian	50
4.5 Uji Realibilitas	51
4.6 Uji Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S)	51
4.7 Hasil Uji Multikolineritas.....	54
4.8 Uji Glesjer.....	56
4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	57
4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	57
4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)	58
4.12 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Fraud Triangle	13
2.2 Kerangka Penelitian	30
4.1 Grafik Histogram	52
4.2 Grafik Normal P-plot	53
4.3 Grafik Scatterplot	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	71
2. Kuesioner	72
3. Output SPSS Profil Responden	80
4. Hasil Data Kuesioner	81
5. Output Hasil Uji Kualitas Data	84
6. Output SPSS Uji Statistik Deskriptif	90
7. Output SPSS Uji Asumsi Klasik	101
8. Output SPSS Uji Regresi	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat tentang isu dan fenomena-fenomena di lapangan mengenai adanya banyak kecurangan dan ditemukannya kasus pemeriksaan hasil laporan keuangan pada pemerintah dan ditemukannya bukti laporan yang terdeteksi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) namun tidak ditemukan pada auditor internal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit aparat inspektorat selaku audit internal pemerintah masih relative kurang baik. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (Prasetyani, 2012).

Dalam mendeteksi kecurangan perlu dilakukan pemeriksaan kecurangan (*fraud auditing*). Pemeriksaan kecurangan merupakan pendekatan audit proaktif yang didesain untuk memberikan respon terhadap resiko kecurangan. Proses audit harus berdasarkan pada teori kecurangan. Khususnya selama tahap perencanaan audit, auditor harus menentukan tipe dan ukuran resiko kecurangan. Hal ini bisa dilakukan dengan melaksanakan penilaian risiko kecurangan (Suprajadi, 2009:55)

Metodologi yang digunakan dalam Penilaian risiko kecurangan khususnya dalam ruang lingkup audit atas laporan keuangan dapat menggunakan panduan yang diterbitkan oleh IFAC Audit Guide (2007:145) bahwa dalam prosedur penaksiran risiko kecurangan, audit team harus mengidentifikasi risiko-risiko kecurangan secara bersama-sama ke dalam elemen-elemen fraud triangle. Kemudian nantinya akan dinilai tingkat signifikansinya berdasarkan *professional judgment*.

Nurharyanto dan Widyaishwara (2010:1) menjelaskan upaya penciptaan lingkungan pengendalian dikembangkan sedemikian rupa sehingga pemahaman tentang fraud telah diberi batasan dan definisi yang lebih konkrit. Sementara upaya lainnya adalah memperluas kewenangan dalam tanggung jawab pembuatan kebijakan anti-fraud di level pimpinan institusi, termasuk langkah-langkah pencegahan (*prevention*) dan pendeteksian (*detection*) *fraud*. Lingkungan pengendalian yang kondusif dapat mendorong peran auditor internal secara cepat membangun rencana tindak program pencegahan *fraud*, dan akan mendapatkan cara untuk memberi nilai tambah bagi organisasinya. Konsekuensinya pimpinan audit internal yang gagal mengantisipasi harapan/tuntutan para *stakeholder*-nya maka jabatan yang ia duduki menjadi taruhannya.

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi dan peraturan yang terkait telah meningkatkan tuntutan dan peran para pimpinan instansi, yang saat ini harus memandang *fraud* dan penyalahgunaan wewenang sebagai ancaman yang lebih besar. Mereka harus mampu mengarahkan penanganan permasalahan *fraud* secara lebih rinci dan dapat dioperasionalkan oleh pelaksana di lapangan. Pengujian pengendalian intern secara berkala yang dilakukan oleh para pucuk pimpinan instansi, akan menjadi tidak bermakna apabila *fraud* dalam skala besar terlambat diketahui terjadinya. Pimpinan instansi akan dihadapkan pada potensi kerugian yang besar, baik dari jumlah nilai uang, risiko reputasi, karir bahkan ancaman hukuman yang sangat berat (Bastian, 2003).

Kecakapan profesional dari seorang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil audit. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada standar umum pemeriksaan yang

pertama menyatakan bahwa pemeriksa diwajibkan untuk menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian/ kemahiran profesionalnya dalam melakukan pemeriksaan. Standar ini menghendaki pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa (Batubara,2008). Kecakapan profesional merupakan syarat yang penting untuk di implementasikan dalam pekerjaan audit. Penelitian Rahman (2009) memberikan bukti empiris bahwa kecakapan profesional (*due professional care*) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit. Kecakapan profesional auditor yang cermat dan seksama menunjukkan kepada pertimbangan profesional (*professional judgment*) yang dilakukan auditor selama pemeriksaan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai kerangka acuan, pada tahun 2008 disahkan dengan PP 60/2008 memiliki 5 komponen utama – lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Program dan pengendalian anti-fraud harus sejalan dengan komponen-komponen tersebut untuk menghindari temuan dan kelemahan-kelemahan signifikan, dan terjadinya kelemahan material dalam pengendalian intern.

Lingkungan pengendalian yang berkaitan dengan program anti-fraud saat ini ditandai dengan perubahan kebijakan dari upaya program kepatuhan yaitu identifikasi dan investigasi kejadian fraud menjadi langkah pencegahan dan pendeteksian secara proaktif yang dikaitkan pada pengendalian intern organisasi. Dengan pendekatan program kepatuhan, langkah dan upaya yang dilakukan dalam memerangi fraud lebih ditekankan pada efektivitas dilakukannya peraturan dan ketentuan yang dijadikan dasar (SPIP, 2008).

Penelitian ini merupakan replikasi dari Penelitian Prasetyani (2012) dengan

Judul “Pengaruh *Fraud Risk Assesment* dan Kecakapan Auditor terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan Jepara”, Hasil penelitian menunjukkan Besarnya pengaruh *Fraud Risk Assesment* aparat pengawasan terhadap kualitas audit yaitu sebesar 14 %, sedangkan sisanya sebesar $(100 \% - 14 \% = 86 \%)$ dipengaruhi oleh variabel lain. Besarnya Pengaruh kecakapan auditor aparat pengawasan terhadap kualitas audit yaitu sebesar 0,00 %, yang artinya tidak ada pengaruh antara kecakapan auditor terhadap kualitas audit aparat inspektorat. Besarnya Pengaruh *Fraud Risk assesment* dan kecakapan auditor aparat pengawasan secara simultan terhadap kualitas audit adalah sebesar 11,9 % dan sisanya $(100 \% - 11,9\% = 88,1\%)$ dipengaruhi oleh variabel lain.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Obyek Penelitian. Dalam penelitian ini objeknya yaitu Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan objek penelitian pada penelitian sebelumnya yaitu pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Kudus dan Jepara. Dengan demikian, ada perbedaan sudut pandang antara aparat yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Kudus dan Jepara dengan aparat yang bekerja di Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya dipengaruhi oleh faktor budaya etnis, budaya organisasi dan karakter.

Sampel yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparat Inspektorat yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini, yang berwenang yang mempunyai Surat Tugas dari Inspektur (ST) pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah seluruh staf Inspektorat Kabupaten Kudus dan Jepara.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil

judul “**Pengaruh *Fraud Risk Assesment* dan Kecakapan Auditor terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada Kantor Inspektorat Sulawesi Tenggara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *Fraud Risk Assesment* berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Sulawesi Tenggara dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah Kecakapan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat Sulawesi Tenggara dalam pengawasan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pengaruh *Fraud Risk Assesment* terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Menganalisis Pengaruh Kecakapan auditor terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Sebagai bahan perbandingan praktis antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek penyelenggaraan di lapangan serta menambah wawasan dan pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga Inspektorat diharapkan dapat

membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam usulan penelitian ini, pembahasan dan penyajian diuraikan dalam lima bab dengan sistematika pembahasan dan aturannya untuk mempermudah pembaca agar lebih mudah memahami dan mengerti rencana penelitian ini. Adapun gambaran sistematika pembahasan secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, selain itu kerangka pemikiran pembahasan dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen dan pengumpulan data, serta metode analisis data terhadap objek penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi data penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian mendatang, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Audit

Audit merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan kepada publik. Pengertian auditing menurut Sembiring (2014:15) sebagai berikut:

Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasil-hasil tersebut kepada pihak pengguna laporan.

Boynton, Jonhson, dan Kell (2003:5) mendefinisikan auditing sebagai berikut:

Sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif sehubungan dengan asersi mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan tingkat kesesuaian antara berbagai asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Serta menyampaikan hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

Pelaksanaan audit dalam bidang pemerintahan dikenal dengan sebutan audit sektor publik. Tujuan pelaksanaan audit sektor publik adalah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Secara teknis, audit pada sektor publik sama dengan audit pada sektor swasta.

Menurut Jones dan Bates (1990) dalam Indrijawati (2013:21) yang membedakan pelaksanaan audit dua sektor tersebut adalah pada kebutuhan yang mendasari untuk melaporkan pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, audit sektor publik memiliki cakupan tugas dan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dari pada audit pada sektor swasta. Pelaksanaan audit atas instansi pemerintahan merupakan sesuatu hal yang penting dalam rangka memberikan keyakinan bahwa laporan pertanggung jawaban yang menyangkut aspek keuangan dan operasional, kredibilitasnya

dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian Audit menurut Arens, James, dan Loebeckke (2008:4) mengatakan bahwa “Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kinerja yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Adapun audit menurut Mulyadi (2002:9) mengatakan bahwa :

Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan Berbagai definisi di atas, Boynton, Johnson, dan Kell (2003)

Menyimpulkan audit menjadi poin poin sebagai berikut:

1. Audit dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti.
2. Audit dilakukan dengan membandingkan informasi (bukti-bukti) yang telah dikumpulkan dan membandingkannya dengan *established criteria*.
3. Pemeriksa mengkomunikasikan hasil pemeriksaan terhadap pihak yang berkepentingan.
4. Menetapkan tingkat kesesuaian

2.1.2 Tujuan Audit

Tujuan audit menurut Arens, James, dan Loebeckke (2008:140) adalah sebagai berikut:

The objective of the ordinary audit of financial statement by the independent auditor is the expression of an opinion on the fairness with which they present fairly, in all material respects, financial position, results of operations, and cash flows in conformity with generally accepted accounting principles.

Sedangkan tujuan audit menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tertulis di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:110.1), adalah:

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dan semua hal yang materiil, posisi

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan audit adalah menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan, baik dalam aspek materil, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi dalam negara tersebut, yang merupakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2.1.3 Jenis-jenis audit

Menurut Mulyadi (2008) Auditing pada umumnya digolongkan menjadi tiga golongan, yakni audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan auditor tersebut dikenal dengan sebutan Opini auditor.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kapatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan adalah pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan rekomendasi-rekomendasi dari temuan - temuan tersebut. Audit kepatuhan

dapat dilakukan oleh akuntan publik, auditor intern dan auditor pemerintah. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria atau yang memiliki otoritas lebih tinggi.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur metode operasi suatu organisasi. Menurut Abdul Halim (2003:7), tujuan audit operasional adalah untuk :

1. Mengevaluasi kinerja.
2. Menilai efisiensi dan efektivitas.
3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

2.1.4 *Fraud*

2.1.4.1 Definisi *Fraud*

Istilah *fraud* (Inggris) atau *fraude* (Belanda) sering diterjemahkan sebagai kecurangan (Tuanakotta, 2007:10). Sering juga kecurangan (*fraud*) secara sederhana diartikan dengan ketidak-jujuran. Menurut Albrecht (2006:7) definisi *fraud* adalah :

Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise. Which are resorted to by one individual, to get an advantage over another false representations. No definite and invariable rule can be a laid down as a general preposition in defining fraud, as it includes surprise trickery cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.

Association of Certified Fraud Examiners (2005) mengkategorikan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi didefinisikan sebagai “*Spoiled; tainted; depraved; debased; morally degenerate*”. Skema korupsi (*corruption schemes*) dapat dipecah menjadi empat klasifikasi: (1) pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), (2) suap

(*bribery*), (3) pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan (4) pemerasan ekonomi (*economic extortion*)”.

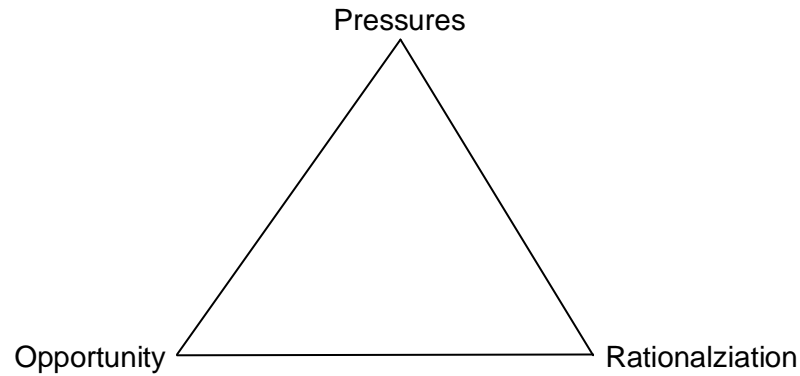
b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk *skimming*, *larceny* atau *fraudulent disbursements*, dan (2) penyalahgunaan non-kas (*non-cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larceny*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

c. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)

Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement schemes*) dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan (1) mencatat pendapatan-pendapatan fiktif (*fictitious revenues*), (2) mencatat pendapatan (*revenue*) dan/atau beban (*expenses*) dalam periode yang tidak tepat, (3) menyembunyikan kewajiban dan beban (*concealed liabilities and expenses*) yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah kewajiban dan beban agar perusahaan tampak lebih menguntungkan, (4) menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan (*improper disclosures*), atau (5) menilai aset dengan tidak tepat (*improper asset valuation*).

Arens, James, dan Loebeckke (2003:365) menyebutkan bahwa terdapat tiga kondisi mengapa seseorang melakukan *fraud* yang kemudian disebut dengan *fraud triangle*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga kondisi (*fraud triangle*) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Fraud Triangle

1. Tekanan (*Pressures*)

Terdapat tekanan yang berbeda yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. Arens mendefinisikan *perceived pressures* sebagai situasi dimana manajemen atau karyawan memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.

2. Kesempatan (*opportunities*)

Kesempatan (*opportunity*) adalah situasi dimana seseorang percaya bahwa dia memiliki keadaan yang menjanjikan atau memungkinkan untuk melakukan *fraud* dan tidak dapat terdeteksi yang menyebutkan bahwa kesempatan untuk melakukan atau menyembunyikan *fraud* harus ada agar *financial statement fraud* dapat terjadi. Kesempatan dapat timbul akibat kurangnya pengawasan dewan direksi maupun komite audit, pengendalian internal yang lemah, transaksi yang tidak biasa ataupun rumit, estimasi akuntansi yang membutuhkan penilaian subjektif yang signifikan, dan staf audit internal yang tidak efektif. Pada umumnya *fraud* tidak berhasil dilakukan pada organisasi yang memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, dan para karyawan yang

menyadari bahwa pengendalianpengendalian tersebut dibuat untuk mencegah *fraud*.

3. Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi adalah hadirnya sebuah perilaku, karakter, atau kumpulan nilai etis yang membiarkan manajemen atau karyawan secara sengaja melakukan sebuah tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang membebaskan tekanan yang cukup yang menyebabkan mereka untuk merasionalisasikan atau membenarkan sebuah tindakan yang tidak jujur.

2.1.4.2 Tipe *Fraud*

ACFE (2005:65) seperti yang dikutip dari SAS No. 99 menyebutkan bahwa terdapat dua tipe salah saji yang dianggap relevan untuk tujuan audit:

1. Salah saji yang timbul akibat *fraudulent financial reporting*.

Kategori ini didefinisikan sebagai salah saji yang disengaja atau dimasukkannya suatu jumlah atau pengungkapan pada laporan keuangan dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan.

2. Salah saji yang timbul akibat *misappropriation of assets*.

Pada kategori ini termasuk pencurian atas aset entitas dimana efek dari pencurian tersebut mempengaruhi laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Sedangkan menurut Albrecht (2006:10-15) terdapat enam jenis *fraud* yaitu:

1. *Employee embezzlement* merupakan *fraud* yang terjadi ketika karyawan menipu pemberi kerja dengan melakukan pencurian terhadap aset perusahaan. *Fraud* tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

2. *Management fraud* adalah manipulasi yang menyesatkan atas laporan keuangan, *stockholders lenders* dan semua pengguna laporan keuangan merupakan korban dari *fraud* jenis ini.
3. *Invesment scams* merupakan *fraud* yang terjadi ketika seseorang mengelabui investor untuk menanamkan sejumlah uang ke dalam investasi yang sebenarnya tidak berharga.
4. *Vendor fraud* dapat terjadi akibat *fraud* yang dilakukan oleh *vendor* yang bertindak sendiri ataupun *fraud* yang dilakukan melalui kolusi antara pembeli dan *vendor*. *Vendor fraud* biasanya mengakibatkan biaya pembelian yang lebih tinggi, pengiriman barang yang berkualitas rendah, maupun tidak adanya pengiriman barang meskipun pembayaran telah dilakukan.
5. *Customers fraud* merupakan *fraud* yang terjadi ketika pelanggan tidak membayar penuh barang yang dibeli, atau pelanggan menipu perusahaan untuk memberikan sesuatu kepada mereka yang bukan merupakan haknya.
6. *Miscellaneous fraud* adalah *fraud* yang tidak termasuk kedalam lima jenis *fraud* diatas digolongkan kedalam *miscellaneous fraud*.

2.1.4.3 Tanggung Jawab Auditor atas *Fraud*

Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi *fraud* disebutkan dalam SAS I AU 110 yaitu "*The auditor has a responbility to plan and perform the audit to obtain resonable assurance about whether the financial statement are fress of material misstatement, whether couused by error or fraud*".

Sedangkan dalam SPAP, dapat dilihat juga pada SA seksi 110 (PSA No.01) (SPAP Ikatan Akuntansi Indonesia, 2001:361:1) bahwa:

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan.

2.1.4.4 *Fraud Risk Assessment*

Nurharyanto dan Widyaishwara (2010) menjelaskan bahwa tidak ada instansi yang akan mampu membangun suatu program dan pengendalian untuk meminimalkan fraud tanpa mampu mengidentifikasi risiko yang harus diatasi atau diminimalkan. Namun demikian jarang sekali instansi yang telah memiliki gugus tugas (*task force*) untuk menilai risiko fraud. Penilaian risiko fraud merupakan tonggak penting dalam program anti-fraud untuk mengantisipasi (bukan sekedar bereaksi atas) terjadinya fraud dan penyalahgunaan wewenang. Instansi yang tidak menjalankan penilaian atas risiko fraud, umumnya juga jarang mengkaitkan antara aktivitas pengendalian preventif dan detektif untuk meminimalkan risiko fraud yang teridentifikasi. Apabila penilaian risiko fraud telah ditetapkan maka instansi diminta untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menguji desain efektifitas program pengendalian anti-fraud.

Meskipun audit dan monitoring merupakan bagian integral dari kerangka kerja SPIP, instansi publik umumnya jarang melakukan audit dan pemantauan khususnya yang terkait dengan fraud. Melalui program fasilitasi oleh internal audit, program monitoring fraud merupakan bagian dari aktivitas operasi sehari-hari. Sebagai tambahan, bagian internal audit harus menuangkan program penilaian risiko dalam rencana kerja tahunannya (Amrizal, 2004)

Meskipun pimpinan instansi telah memiliki tanggung jawab tersendiri atas program anti-fraud, perlu diantisipasi bahwa beberapa instansi menyerahkan tanggung jawab operasional program anti-fraud langsung kepada internal audit. Efektivitas menangani (memegang “bola panas”) atau upaya program anti-fraud sangat tergantung pada dukungan pimpinan instansi. Sebelum menerima tanggung jawab operasional untuk program anti-fraud, internal audit harus mampu meyakinkan pimpinan instansi bahwa mereka bertanggungjawab

mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh internal audit dalam program anti-fraud (Novyanti, 2008)

2.1.4.5 Mengorganisasikan Penilaian Risiko Fraud

Lebih lanjut Nurharyanto dan Widyaishwara (2010) menambahkan bahwa penilaian risiko fraud yang efektif akan dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang tidak terdeteksi dan memperkuat kemampuan organisasi dalam mencegah dan mendeteksi fraud serta penyalahgunaan sebelum menjadi skandal bagi instansi. Selain itu penilaian risiko fraud dapat mengidentifikasi penghematan biaya yang timbul dibandingkan dengan biaya penilaian secara langsung. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penilaian risiko fraud mencakup:

1. Mengorganisasikan penilaian risiko berdasarkan siklus tugas pokok dan fungsi instansi atau siklus kemungkinan terjadinya fraud.
2. Menetapkan unit dan lokasi untuk dinilai
3. Mengidentifikasi skema dan skenario potensi terjadinya fraud dan penyalahgunaan wewenang.
4. Menilai kemungkinan terjadinya dan tingkat signifikansi risiko.

2.1.4 Kecakapan Auditor

Pemeriksaan adalah merupakan teknik pengawasan yaitu kegiatan untuk menilai apakah hasil pelaksanaan yang sebenarnya telah sesuai dengan seharusnya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditemukan. Auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi publik (Mulyadi, 2002). Kehati-hatian profesional adalah auditor diharuskan untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama. Penggunaan kemahiran menuntut auditor

untuk melaksanakan skeptisme profesional yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit.

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan dinyatakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kecakapan profesionalnya secara cermat dan seksama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menyatakan auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan dinyatakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Kemudian dalam standar audit aparat pengawas intern pemerintah dinyatakan bahwa auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. *Due professional care* dapat diterapkan dalam pertimbangan

profesional, walaupun dalam prakteknya masih terjadi penarikan kesimpulan yang belum tepat saat proses audit telah dilakukan.

2.1.6 Kualitas Audit

AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) dalam Christiawan (2002:82) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor. Auditor harus memiliki kompetensi yang memadai agar dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan baik. Jika kompetensi kurang atau tidak memadai, maka dapat diduga bahwa auditor akan sukar mencapai tujuan auditnya, sehingga berakibat pula pada kualitas audit yang dihasilkannya (Prasetyani, 2012).

Independensi seorang auditor dalam melakukan audit akan mempengaruhi kualitas auditnya. Oleh karena itu, independensi harus senantiasa dijaga oleh auditor. Auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapa pun, karena auditor melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kepada lembaga atau pihak lain yang memberikan kepercayaan atas pekerjaan auditor. Auditor harus bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil audit yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Auditor harus menghindari dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak dapat mempertahankan independensinya sehingga tidak mampu

memberikan penilaian yang obyektif dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil audit (Rasuman, 2011). Namun dengan adanya fakta dan fenomena di atas mengakibatkan kualitas audit di sektor publik dan bisnis dipertanyakan, oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian dampak dari kompetensi terhadap kualitas audit disektor publik dan bisnis.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kompetensi auditor sedangkan probabilitas untuk melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Dengan demikian, kompetensi, independensi, dan motivasi memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas audit.

2.1.7 Norma Pengawasan

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007:53) Norma pengawasan memuat harus dipatuhi oleh auditor dalam rangka menjaga mutu hasil audit, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan/pengkomunikasian hasil audit. Norma pengawasan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi semua auditor yang terlibat dalam penugasan audit:

- a. Pedoman bagi auditor dalam menyusun perencanaan audit, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil audit.
- b. Pedoman bagi supervisor dan penanggung jawab audit untuk melakukan pengawasan dan reviu dokumen audit.
- c. Pedoman bagi reviewer institusi audit yang lebih tinggi, misalnya review oleh Inspektorat Departemen Dalam Negeri kepada Inspektorat Provinsi, dan review oleh Inspektorat Provinsi terhadap Inspektorat Kabupaten.

- d. Pedoman untuk meminta pertanggung jawaban auditor mengenai kelemahan yang ditemukan dalam penyajian hasil auditnya.
- e. Media untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap institusi auditor.

2.1.7.1 Pokok-Pokok Norma Pengawasan

Norma Pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28/2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. Norma pengawasan tersebut meliputi norma umum, norma pelaksanaan, dan norma pelaporan, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Norma Umum, meliputi norma pemeriksaan, evaluasi dan monitoring.

- 1) Norma Pemeriksaan, mengatur antara lain:

Pemeriksaan atas instansi pemerintah daerah agar ditetapkan dalam lingkup yang cukup luas sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang akan menggunakannya. Secara umum pemeriksaan adalah untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

- 2) Evaluasi dimaksudkan untuk:

- a) Evaluasi rancangan peraturan daerah,
 - b) Evaluasi Peraturan Daerah.
 - c) Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- 3) Monitoring dimaksudkan untuk:

- a) Memperoleh data mutakhir atas tindak lanjut pelaksanaan peraturan perundang-undangan; undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri.
- b) Memperoleh informasi tentang kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan upaya mengatasinya.
- c) Memperoleh umpan balik dari pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
- d) Memperoleh data mutakhir tentang kemajuan/perkembangan suatu kegiatan, pelaksanaan anggaran, hambatan yang terjadi dan upaya mengatasinya.
- e) Memperoleh data mutakhir tentang tindak lanjut hasil pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, BPK, DPR, DPD dan DPRD.

2. Norma Pelaksanaan Pengawasan, meliputi;

1) Perencanaan pengawasan,

Pengawas atau lembaga pengawasan wajib menyusun rencana kerja pengawasan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pengawasan yang efektif. Setiap langkah kerja pengawasan harus ditetapkan secara sistematis dan menggambarkan rencana kerja bersih sehingga mengefektifkan waktu kerja pengawas dan penggunaan sumber daya lainnya.

2) Bimbingan dan pengawasan terhadap tim pengawas,

Norma ini mewajibkan lembaga pengawasan atau ketua tim pengawas menjamin pejabat pengawas pemerintah yang kurang cakap dan kurang pengalaman mendapat bimbingan yang cukup dalam melaksanakan tugas pengawasan.

3) Bukti pengawasan.

Norma ini menjelaskan pengertian bukti pengawasan yang dianggap cukup, kompeten, dan relevan. Norma ini juga menjelaskan jenis bukti pengawasan meliputi; bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, bukti pengakuan, bukti ketangkap tangan, bukti analisis, dan catatan lain.

4) Identifikasi permasalahan di daerah

Norma ini mewajibkan pejabat pengawas pemerintah mengungkapkan permasalahan yang terjadi di daerah secara kronologis, obyektif, cermat, dan independen.

5) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kehematan, efisiensi dan efektivitas.

Norma ini mewajibkan pejabat pengawas pemerintah melakukan pengkajian terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan secara akurat atas pelaksanaan kegiatan pada instansi yang diawasi, serta menilai efisiensi, kehematan dalam penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaiannya.

3. Norma Pelaporan

Norma Pelaporan memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan bentuk laporan tertulis meliputi “nota dinas/surat” dan “laporan hasil pengawasan lengkap”, ketepatan waktu laporan, dan isi laporan. Salah satu *point* dalam norma pelaporan adalah mengenai penyajian temuan dan rekomendasi: Permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai temuan hasil pengawasan harus dikemukakan secara obyektif dan tidak memihak disertai informasi yang cukup tentang pokok masalah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca/pengguna laporan

memperoleh pandangan dalam perspektif yang tepat, tidak menyesatkan dan menunjukkan permasalahan yang perlu perhatian.

2.1.7.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar. Tiga proses tersebut adalah perencanaan (termasuk didalamnya aktifitas penetapan APBD/penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap penggunaanggaran/pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan. Sampai sejauh ini, di Indonesia belum di atur mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah yang merupakan acuan untuk menyusun dan membuat pelaporan keuangan pemerintah. Meskipun di tahun 2002 dan tahun 2003 telah dilakukan sejumlah dengar pendapat publik atas 11 rancangan publikasian mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah. Namun sampai sekarang belum ada pengesahannya sehingga berdampak pada penyusunan pelaporan keuangan dan juga audit atas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Afiah, 2009).

Akuntansi, sebagai sistem informasi, berfungsi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas kepada berbagai orang yang berkepentingan. Informasi adalah data yang telah diolah yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan sistem adalah sekumpulan sumber daya yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan (Bodnar, dalam Afiah, 2009)

Sistem informasi akuntansi dalam sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik mempunyai arti dan peran penting terkait pada fungsinya dalam pengukuran dan pengendalian. Dalam fungsi pengukuran, akuntansi melakukan proses pengumpulan, pencatatan realisasi pendapatan dan belanja serta transaksi-transaksi yang terjadi diluar pendapatan dan belanja, serta aktivitas pelaporan. Selanjutnya akan dapat digunakan sebagai pengukur kinerja ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pemerintah daerah. Sistem akuntansi yang dirancang secara baik, akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula (Jones, dalam Afiah, 2009)

Sejalan dengan era reformasi, akuntansi sektor publik mulai mendapat perhatian yang serius. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga - lembaga sektor publik. Dalam pemerintahan sendiri sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktek manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Organisasi sektor publik termasuk pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya (Mardiasmo, 2002).

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik dan sektor swasta disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur kelembagaan, karakteristik anggaran, *stakeholder*, sistem manajemen/akuntansi (Haryanto, 2007).

2.1.7.3 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004).

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern

pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Susmanto, 2008).

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, kegiatan utama APIP meliputi audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi, namun peraturan ini hanya mengatur mengenai Standar Audit APIP. Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini: pertama, audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum; kedua, audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif; dan ketiga, audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

Menurut Susmanto (2008) APIP melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (fungsi *quality assurance*). Pengawasan yang dilaksanakan APIP diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan tersebut.

Lembaga/badan/unit yang ada di dalam tubuh pemerintah (pengawas intern pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari: pertama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); kedua, Inspektorat Jenderal Departemen; ketiga, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) /Kementerian; dan keempat, Lembaga Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.

Menurut Cahyat (2004) Berdasarkan obyek pengawasan, pengawasan terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah. Tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah di antaranya yaitu melakukan pengawasan keuangan. Beberapa kewenangan daerah yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah adalah pelaksanaan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, penelitian dan penilaian laporan pajak pribadi, penyelesaian ganti rugi, serta inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan Pemda.

2.2 Penelitian Terdahulu

Yunita Nurfajri Prasetyani (2012) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Fraud Risk Assesment dan Kecakapan Auditor terhadap kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan Keuangan Daerah (Studi kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan Jepara. Hasil penelitian menunjukkan Besarnya pengaruh *Fraud Risk Assesment* aparat pengawasan terhadap kualitas audit yaitu sebesar 14 %, sedangkan sisanya sebesar $(100 \% - 14 \% = 86 \%)$ dipengaruhi oleh variabel lain. Besarnya Pengaruh kecakapan auditor aparat

pengawasan terhadap kualitas audit yaitu sebesar 0,00 %, yang artinya tidak ada pengaruh antara kecakapan auditor terhadap kualitas audit aparat inspektorat. Besarnya Pengaruh *Fraud Risk assesment* dan kecakapan auditor aparat pengawasan secara simultan terhadap kualitas audit adalah sebesar 11,9 % dan sisanya ($100 \% - 11,9\% = 88,1\%$) dipengaruhi oleh variabel lain.

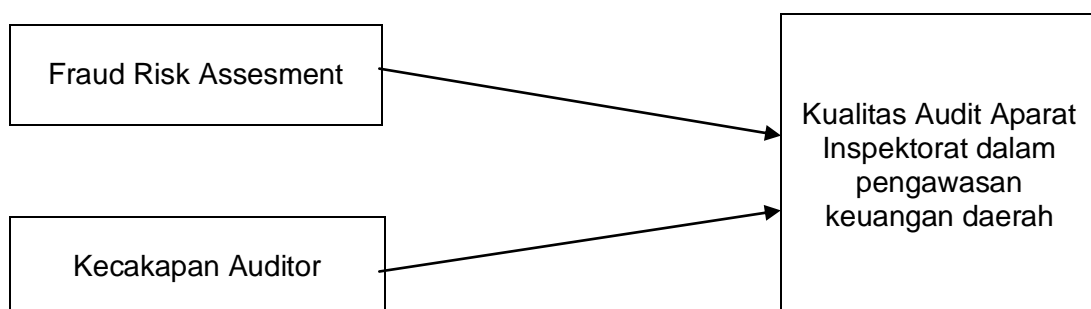
Muh. Taufiq Efendy (2010) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo) dengan hasil menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, independensi, dan motivasi memberikan sumbangan terhadap variabel dependen (kualitas audit) sebesar 72,2%, sedangkan sisanya 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Implikasi temuan penelitian ini bagi upaya terwujudnya audit yang berkualitas adalah perlunya pemberian motivasi kepada auditor tentang urgensi audit yang berkualitas di samping upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan.

Mochammad Taufik (2008) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengalaman Kerja dan Pendidikan Profesi Auditor Internal Terhadap Kemampuan Mendeteksi *Fraud* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud, di mana hasil pengujian menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,002, lebih kecil dari probabilitas 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan profesi berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud, di mana hasil pengujian menunjukkan angka

signifikansi sebesar 0,001, lebih kecil dari probabilitas 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa pengalaman kerja dan pendidikan profesi auditor internal secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud, di mana hasil pengujian statistik F menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,001.

Dalam tesis Batubara (2008) yang melakukan penelitian pada Bawasko Medan mengenai analisis pengaruh latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan, dimana hasil penelitiannya menggambarkan bahwa latar belakang, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi pemeriksa secara parsial berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Untuk latar belakang pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

Fraud Risk Assesment adalah proses rekursif (*recursive*) penelusuran bukti (*evidence-drive*) untuk menentukan keyakinan dan menilai akan keaslian dan kebenaran bukti audit guna mendukung penerbitan opini audit". Tidak ada instansi yang akan mampu membangun suatu program dan pengendalian untuk meminimalkan fraud tanpa mampu mengidentifikasi risiko yang harus diatasi atau diminimalkan (Amrizal, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Carpenter, Durtschi dan Gaynor (2002) mengungkapkan bahwa jika auditor lebih skeptis, mereka akan mampu lebih menaksir keberadaan kecurangan pada tahap perencanaan audit, yang akhirnya akan mengarahkan auditor untuk meningkatkan pendeteksian kecurangan sehingga menghasilkan Kualitas Audit yang baik. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : *Fraud Risk Assesment* berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Kecakapan auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Kecakapan profesional berarti seseorang harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan (Darwis, 2014). Pada penelitian Batubara (2008) menyimpulkan bahwa kecakapan profesional secara parsial berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Kecakapan Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan diuji pula pengaruh secara simultan variabel-variabel independen yaitu *Fraud Risk Assesment* dan *Kecakapan Profesional* terhadap *Kualitas Audit* dalam pengawasan keuangan daerah maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Secara simultan *Fraud Risk Assesment* dan *Kecakapan Auditor* berpengaruh terhadap *Kualitas Audit*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan studi awal yaitu pencarian materi dan pembuatan draft kuisisioner. Lalu mengumpulkan data lapangan. Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan pemberian kuisisioner. Kemudian Pengolahan data, pada tahapan ini penulis mengolah data yang berasal dari kuisisioner yang telah diisi responden. Pada tahap analisis data, penulis melakukan analisis implikasi penelitian. Pada tahap akhir, penulis membuat hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran dari semua proses penelitian yang dilakukan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Inspektorat Sulawesi Tenggara dan waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan.

3.3 Populasi dan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Seluruh Staff Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan sampelnya adalah Aparat Inspektorat yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini, yang berwenang yang mempunyai Surat Tugas dari Inspektur kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Jumlah Sampel yang diambil sebanyak 35 orang. Pembagian kuisisioner diberikan secara langsung kepada Responden dari Peneliti tanpa perantara. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah

Metode Purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kualitas audit sedangkan variable independennya terdiri dari *fraud risk assesment* (X1) dan kecakapan auditor (X2). Definisi operasional dan Indikator untuk variabel-variabel tersebut adalah:

1. *Fraud Risk Asessment*

Penilaian risiko *fraud* merupakan tonggak penting dalam program anti-*fraud* untuk mengantisipasi (bukan sekedar bereaksi atas) terjadinya *fraud* dan penyalahgunaan wewenang (Amrizal, 2004). Adapun pengertiannya yaitu penaksiran seberapa besar risiko kegagalan auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dalam asersi manajemen. Penilaian risiko *fraud* merupakan Variabel Independen dalam penelitian ini. Variabel ini dapat diukur dari prosedur pendeteksian kecurangan. Model indikator untuk Fraud Risk Assesment, yaitu berupa contoh kasus yang diberikan dengan Skala Interval (likert) serta skor 1 (Tidak ada indikasi Fraud) sampai 5 (Ada indikasi fraud)

2. Kecakapan Auditor

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 [8] tentang standar audit, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. Sedangkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007[9] tentang Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara dinyatakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas audit ini diadopsi dari penelitian Harhinto (2004) dengan beberapa modifikasi berdasarkan SPKN.

3. Kualitas audit

Menurut Kharismatuti dan Hadiprajitno (2012) Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berpedoman pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Model yang disajikan sebagai bahan indikator untuk kualitas audit, yaitu (1) melaporkan kesalahan instansi, (2) sistem akuntansi instansi, (3) komitmen yang kuat, (4) pekerjaan lapangan tidak mudah percaya dengan pernyataan klien dan (5) pengambilan keputusan.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Dependen Kualitas Audit (Y)	Probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berpedoman pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan	Temuan audit yang akurat serta menemukan sekecil apapun penyimpangan yang ada, tidak pernah melakukan rekayasa atas temuan yang dilaporkan, auditee tidak akan ditemui kesalahan / penyimpangan. Sebab sebelumnya pernah mengaudit <i>auditee</i> yang sama dan waktu itu tidak ada temuan, Rekomendasi yang berikan dapat memperbaiki penyebab dari kesalahan / penyimpangan yang

		ada, Laporan hasil audit dapat dipahami oleh <i>auditee</i> , Audit yang dilakukan akan dapat menurunkan tingkat kesalahan / penyimpangan yang selama ini terjadi, Hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh <i>auditee</i> , Auditor terus memantau tindak lanjut hasil Audit
Independen <i>Fraud Risk Assesment</i> (X ₁)	Penaksiran seberapa besar risiko kegagalan auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan	contoh kasus yang diberikan dengan Skala Interval (likert) serta skor 1 (Tidak ada indikasi Fraud) sampai 5 (Ada indikasi fraud)
Independen Kecakapan Auditor (X ₂)	Sikap cermat, seksama, dan berhati-hati yang dimiliki auditor dalam pemeriksaan dan penyusunan laporan audit	Pelatihan teknis mengikuti training akuntansi dan audit, memberikan pendapat /rekomendasi dalam melakukan prosedur investigasi yang sesuai dengan proses audit, selalu memiliki sikap kehati-hatian profesional yaitu merencanakan dan mengawasi secara seksama (selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit), memiliki kemampuan berkomunikasi dan kreativitas serta kemampuan bekerjasama dengan orang lain, memiliki Pengalaman dalam melakukan pemeriksaan sebelumnya, memiliki rasa ingin tahu yang besar dan berpikiran luas serta mampu menangani ketidakpastian, menggunakan ilmu statistik dalam Pemeriksaan, melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat

3.5 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data kualitatif, yaitu terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif, berupa penjelasan tentang penilaian resiko audit yang diterapkan oleh Inspektorat Sulawesi Tenggara
- b. Data kuantitatif, yaitu penelitian yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan - hubungannya. Tujuannya adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan Penilaian resiko audit

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui metode pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data yang ada, khususnya pada *Auditor internal and Accounting Staff*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.6 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan
 - a. Wawancara, yaitu melakukan kegiatan tanya jawab dengan pejabat dan aparat pengawas yang terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Studi Kepustakaan

Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal, media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

3. Mengakses *Website* dan Situs-situs Terkait

Website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut.

4. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subyek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis juga. Pada penelitian ini Kuesioner dibagikan kepada 35 responden.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian (Arikanto, 1996:49). Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis linear berganda. Analisis terbagi dalam lima tahap, yaitu pertama, analisis ditujukan untuk mengetahui statistik deskriptif responden. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel independensi. Tahap selanjutnya adalah menganalisis kualitas data. Pada tahap ketiga, analisis ditujukan untuk menguji ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Dalam tahap selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda. Pada analisis regresi berganda

digunakan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh Pengaruh *Fraud Risk Assesment* dan kecakapan Auditor terhadap Kualitas Audit. Kemudian pada tahap terakhir dilakukan pengujian atas hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengubah kumpulan data mentah menjadi dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi yang terjaring.

3.7.2 Analisis Regresi Regresi Berganda

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan regresi linear regresi berganda, karena penelitian ini ingin mengetahui hubungan variabel secara secara *simultan* sehingga rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Dimana :

Y = Kualitas *audit*

β_0 = koefisien *Intercept* (menyatakan berapa besar rata – rata Y jika X $\beta=0$)

X1 = Fraud Risk Assesment

X2 = *Kecakapan Auditor*

$\beta_1... \beta_2$ = *Koefisien Regresi* (Bilangan yang memperhatikan hubungan Linear antara variabel X dan Y, sedemikian rupa sehingga X berubah satu unit, Rata - rata Y berubah sebesar *koefisien regresi*).

3.7.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) dan uji signifikan simultan (uji statistik F).

1. Uji Signifikan *Parameter* Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau *independent* secara individual dalam menerangkan variasi variabel *dependent*. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu *parameter* (b_i) sama dengan nol, atau: $H_0 : b_i = 0$ Artinya, apakah suatu variabel *independent* bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel *dependent*. Hipotesis alternatifnya (H_A) *parameter* suatu variabel tidak sama dengan nol, atau : $H_A : b_i \neq 0$ Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel *dependent*.

2. Uji Signifikan *Simultan* (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel *independent* atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel *dependent* atau terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua *parameter* dalam model sama dengan nol, atau : $H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ Artinya, apakah semua variabel *independent* bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel *dependent*. Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua *parameter* secara *simultan* sama dengan nol, atau : $H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$ Artinya, semua variabel *independent* secara *simultan* merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel *dependent*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan dilingkungan Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di jalan Dr. Ratulangi No. 27 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

4.1.2 Profil Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara

4.1.2.1 Struktur Organisasi

Susunan struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari :

- 1. Inspektur.** Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 2. Sekretaris.** Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, yang bertugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan perundang-undangan, dokumentasi, dan pengolahan data pengawasan.
 - b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengelolaan keuangan, verifikasi anggaran

pembukuan, melaksanakan pengelolaan keuangan, serta menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional dan melakukan pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, hukum, dan perlengkapan.

3. Inspektur Pembantu. Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Inspektur pembantu wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota. *Masing-masing Inspektur Wilayah membawahi :*

- a. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.

Seksi Pengawas (Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;

- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidangnya.

4. Inspektur Pembantu Khusus. Mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, penyelidikan, dan penelitian terhadap kasus pengaduan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, pendalaman pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan APIP lainnya yang mengandung unsur KKN dan melaksanakan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

5. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas

- a. Pejabat Fungsional Auditor, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pengawasan keuangan sesuai jenjang keahlian yang dimilikinya dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari 7 (tujuh) jenjang jabatan yaitu, Auditor Ahli Utama, Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, Auditor Pratama, Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan, dan Auditor Pelaksana.
- b. Jabatan fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknik operasional di luar pengawasan keuangan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD terdiri dari jenjang Jabatan yaitu, Pengawas Pemerintahan Madya, Pengawas Pemerintahan Muda, dan Pengawas Pemerintahan Pertama.

4.1.2.2 Fungsi Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat provinsi mempunyai fungsi

1. Menyusun perencanaan program pengawasan;
2. Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
3. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1.3 Gambaran Umum Responden

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarkan secara langsung kepada aparat Inspektorat dalam hal ini Auditor Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 Juni 2014. Sampai dengan batas akhir pengembalian yakni tanggal 4 Agustus 2014, dari 35 kuisisioner yang disebarkan, semua kuisisioner kembali. Tingkat pengembalian (*response rate*) yang diperoleh adalah 100 % sedangkan 0 % tidak kembali. Data demografi responden dalam tabel 4.1 di bawah ini menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di lapangan. Tabel 4.1 berisi informasi yang disajikan, antara lain usia, tingkat pendidikan, masa kerja, dan golongan. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa responden (aparat) Pria lebih banyak yaitu 60% dibandingkan responden Wanita yang hanya 40%. Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan usia dan diketahui bahwa mayoritas responden berusia > 50 tahun yaitu sebanyak 40%. Kemudian mereka yang berusia kurang dari 30-40 tahun sebanyak 31,4 %. Sedangkan mereka

yang berusia 41–50 tahun sebanyak 20% dan yang berusia lebih dari < 30 tahun hanya sebanyak 8,6%.

Tabel 4.1 Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)	Presentasi
Jenis Kelamin		
1. Pria	21	60
2. Wanita	14	40
Usia		
1. < 30 Tahun	3	8.6
2. 30-40 Tahun	11	31.4
3. 41-50 Tahun	7	20.0
4. > 50 Tahun	14	40.0
Tingkat Pendidikan		
1. S1	22	62.9
2. S2	13	37.1
Masa Kerja		
1. < 10 tahun	14	40.0
2. 10 – 20 tahun	6	17.1
3. 21> 30 tahun	10	28.6
4. > 30 Tahun	5	14.3
Golongan		
III a	6	17.1
III b	5	14.3
III c	8	22.9
III d	7	20.0
IV a	3	8.6
IV b	6	17.1

Sumber : Data Primer yang diolah, 2014

Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 62,9 %. Kemudian sisanya yang berpendidikan S2 sebanyak 37,1%. Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan masa kerja, diketahui bahwa masa kerja < 10 tahun adalah

sebanyak 40%, yang memiliki masa kerja 10-20 tahun sebanyak 17,1 %, yang memiliki masa kerja 21-30 tahun 28,6%, dan masa kerja > 30 tahun sebanyak 14,3%.

4.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Semua kuesioner yang sudah terkumpul ditabulasi untuk tujuan analisis data. Data yang ditabulasi adalah semua tanggapan atau jawaban responden atas setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan variabel *Fraud Risk Assessment*, Kecakapan Auditor, dan kualitas audit aparat inspektorat daerah. Data hasil tabulasi diolah dengan menggunakan program SPSS versi 20 yang menghasilkan deskripsi statistik variabel penelitian seperti yang tampak pada tabel.

Tabel 4.2 Tanggapan Responden

Variabel Penelitian	Rentang Teoritis	Rentang Aktual	Rata - Rata Teoritis	Rata - Rata Aktual	Standar Deviasi
Fraud Risk Assesment	7 – 35	15 – 35	21	27,89	6,149
Kecakapan Auditor	9 – 45	23 – 45	27	33,91	5,772
Kualitas Audit	8 – 40	24 – 40	24	33,63	4,030

Sumber : Data primer diolah, 2014

Dari tabel 4.2 tersebut dapat diketahui informasi tentang standar deviasi, rata rata, serta rentang teoritis masing-masing pertanyaan dan rentang aktual dari masing masing responden. Secara rinci tabel 4.2 akan dijelaskan berikut ini.

4.1.4.1 *Fraud Risk Assesment*

Variabel *Fraud Risk Assesment* diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 7 pertanyaan Kasus. Seperti terlihat pada tabel 4.2 dari 35 responden dihasilkan terdapat rentang aktual 15 – 35, artinya tingkat *Fraud Risk*

Assesment aparat yang rendah berada pada kisaran 15 dan yang lebih tinggi berada pada kisaran 35. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 7 (menunjukkan yang paling rendah) sampai 35 (menunjukkan yang paling tinggi). Rata-rata aktual (mean) tingkat *Fraud Risk Assesment* untuk seluruh responden adalah 27,89 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 21. Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa aparat cenderung memiliki kemampuan *Fraud Risk Assesment* yang tinggi. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel *Fraud Risk Assesment* adalah sebesar 6,149. Hal ini berarti bahwa variansi data relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari mean.

4.1.4.2 Kecakapan Auditor

Variabel Kecakapan Auditor diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 9 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.2, dari 35 responden dihasilkan rentang aktual 23 – 45, artinya tingkat Kecakapan Auditor yang rendah berada pada kisaran 23 dan tingkat Kecakapan Auditor yang lebih tinggi berada pada kisaran 45. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 9 sampai 45. Rata-rata aktual (mean) tingkat Kecakapan Auditor untuk seluruh responden adalah 33,91 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 27. Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa aparat cenderung memiliki Tingkat Kecakapan yang tinggi sebagai auditor. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel Kecakapan Auditor adalah sebesar 5,772. Hal ini berarti bahwa variansi data relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari mean.

4.1.4.3 Kualitas Audit

Variabel Kualitas Audit diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 8 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.2, dari 35 responden dihasilkan rentang aktual 24 – 40, artinya tingkat kualitas audit aparat yang terendah berada pada kisaran 24 dan tingkat kualitas audit aparat yang lebih tinggi berada pada kisaran 40. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 8 (menunjukkan kualitas audit yang paling rendah) sampai 40 (menunjukkan kualitas audit yang paling tinggi). Rata-rata aktual (mean) tingkat kualitas audit untuk seluruh responden adalah 33,63 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 24. Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa aparat cenderung memiliki kualitas audit yang tinggi. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel kualitas audit adalah sebesar 4,030. Hal ini berarti bahwa variansi data relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari mean.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Distribusi Responden

Deskripsi responden adalah gambaran dari seluruh populasi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah aparat dilingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 35 eksemplar kepada aparat dilingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh kuesioner yang disebarkan sebanyak 35 eksemplar, kembali 35 dan yang tidak kembali sebanyak 0 eksemplar.

Tabel 4.3 Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuisisioner yang dikirim berjumlah 35 eksemplar	35	100
Kuisisioner yang tidak kembali	-	-
Kuisisioner yang kembali	0	0
Kuisisioner yang dapat digunakan dalam penelitian	35	100

Sumber : Data primer diolah, 2014

4.2.2 Uji kualitas data

Sebelum melakukan pengujian data dan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian atas kualitas data untuk menjamin bahwa data yang diperoleh sudah dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan. Pengujian ini secara umum diarahkan untuk menguji alat ukur yang digunakan (kuesioner) serta data yang diperoleh dari responden.

4.2.2.1 Uji validitas

Pengujian validitas instrumen dengan bantuan SPSS 20 *for windows*, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Angka kritik pada penelitian ini $N-2 = 35 - 2 = 33$ dengan taraf signifikan 5% maka angka kritik untuk uji validitas pada penelitian adalah 0,333. Berdasarkan pengujian validitas instrumen, nilai *corrected item-total correlation* bernilai positif dan diatas nilai r_{tabel} 0,333 yang artinya semua pertanyaan dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas variabel kualitas audit dalam meningkatkan Kualitas Audit (Y), Fraud Risk Assessment (X_1), dan Kecakapan Auditor (X_2) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Penelitian

Instrumen Variabel	Butir Instrumen	<i>r</i> hitung	<i>R</i> tabel	Ket
Kualita audit (Y)	Y 1	0,589	0,333	Valid
	Y 2	0,689	0,333	Valid
	Y 3	0,585	0,333	Valid
	Y 4	0,719	0,333	Valid
	Y 5	0,579	0,333	Valid
	Y 6	0,610	0,333	Valid
	Y 7	0,619	0,333	Valid
	Y 8	0,732	0,333	Valid
Fraud RiskAssesment (X1)	X 1.1	0,812	0,333	Valid
	X 1.2	0,839	0,333	Valid
	X 1.3	0,811	0,333	Valid
	X 1.4	0,757	0,333	Valid
	X 1.5	0,704	0,333	Valid
	X 1.6	0,755	0,333	Valid
	X 1.7	0,587	0,333	Valid
Kecakapan Auditor (X2)	X 2.1	0,733	0,333	Valid
	X 2.2	0,790	0,333	Valid
	X 2.3	0,636	0,333	Valid
	X 2.4	0,437	0,333	Valid
	X 2.5	0,540	0,333	Valid
	X 2.6	0,729	0,333	Valid
	X 2.7	0,567	0,333	Valid
	X 2.8	0,710	0,333	Valid
	X 2.9	0,590	0,333	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2014

4.2.2.2 Uji reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut adalah *cronbach's alpha* dengan bantuan SPSS for windows. Koefisien *cronbach's alpha* yang lebih dari nilai *r table* disebut reliabel. Ada juga yang berpendapat reliabel jika *alpha* lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan keandalan instrumen. Selain itu, *cronbach's alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

Tabel 4.5 Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha (α)	Kriteria	Kesimpulan
X1	0,874	0,60	Reliabel
X2	0,820	0,60	Reliabel
Y	0,797	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2014

Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat hasil uji realiabilitas untuk seluruh pertanyaan pada variable sebesar 0,874 X1, 0,820 X2, dan 0,797 Y ini menunjukkan bahwa *cronbach's alpha* lebih besar dari kriteria yaitu 0,60 maka dapat dinyatakan instrumen tersebut reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) dengan ringkasan hasil analisis sebagaimana disajikan pada tabel 4.6 berikut ini.

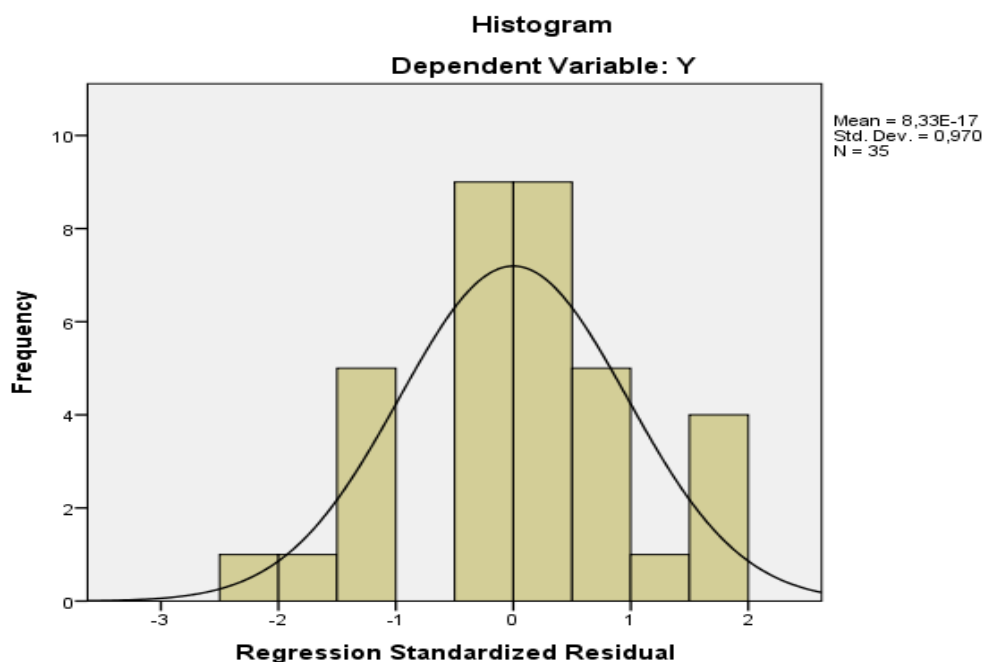
Tabel 4.6 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,70069215
	Absolute	,123
Most Extreme Differences	Positive	,076
	Negative	-,123
Kolmogorov-Smirnov Z		,725
Asymp. Sig. (2-tailed)		,669

Sumber : Data primer yang diolah 2014

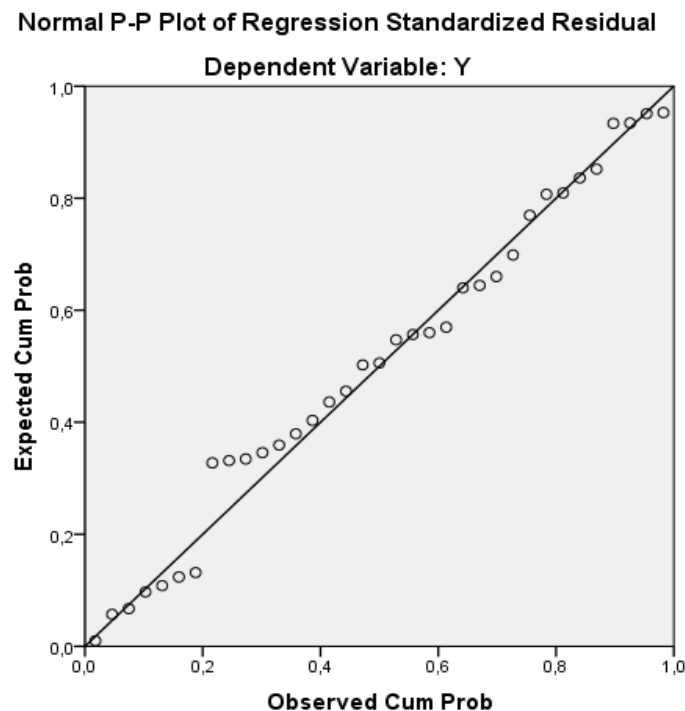
Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,669 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam penelitian ini maka akan disajikan dalam grafik histogram dan grafik normal P-plot. Dimana dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2006) yaitu :

- a. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Sumber : Data primer diolah, 2014

Gambar 4.1 Grafik Histogram



Sumber : Data primer diolah, 2014

Gambar 4.2 Grafik Normal P-plot

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Sedangkan pada grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan

VIF < 10, maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel independen dan sebaliknya (Ghozali, 2006). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolineritas

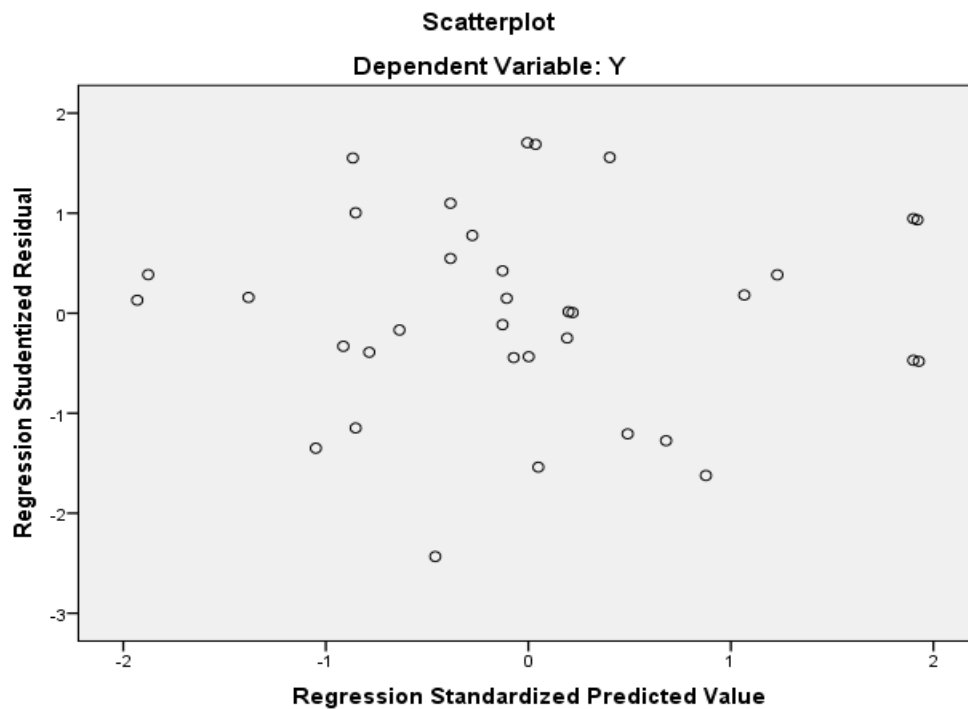
Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keputusan
	Tolerance	VIF	
Fraud Risk Assesment	0,755	1,325	Tidak ada multikolinearitas
Kecakapan Auditor	0,755	1,325	Tidak ada multikolinearitas

Sumber : Data primer diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa angka *tolerance* dari variabel Independen *Fraud Risk Assesment* dan *Kecakapan Auditor* mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Sementara itu, hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen tersebut.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian masing-masing variabel independen X1 dan X2 terhadap variabel terikat (Y). Pengujian homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji heterokedastisitas. Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik sebaran nilai residual. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik plot *Regression Standarized Predicted Value* dengan *Regression Studentized Residual*. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini :



Sumber : Data primer diolah, 2014

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil ini dipertegas dengan uji statistik berupa uji *Glesjer*. Hasil uji yang ditampilkan pada tabel 4.8 di bawah ini menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi semua variabel independen di atas tingkat kepercayaan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Dengan kata lain pada model regresi ini variasi data homogen, terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 4.8 Uji Glesjer

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,181	2,536		,860	,396
1 X1	,001	,076	,003	,016	,987
X2	,019	,081	,048	,234	,817

Sumber : Data primer diolah, 2014

4.2.4 Analisis Regresi Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen *Fraud Risk Assesment* (X1), Kecakapan Auditor (X2), terhadap variabel dependen kualitas audit aparat inspektorat (Y). Berikut ini adalah uraian hasil pengujian regresi berganda dan *output table* pengujian dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20 dalam bentuk output *model summary*, ANOVA (uji F), serta *coefficient* (uji t) seperti pada tabel sebagai berikut:

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tampilan output *model summary* pada tabel 4.9, besarnya *adjusted R2* (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,104. Nilai ini menunjukkan bahwa 10,4 % variasi kualitas audit dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu *Fraud Risk Assesment* dan Kecakapan Auditor. *Standard Error of Estimate* (SEE) 3,815 apabila dibandingkan dengan *standard deviation* variabel dependen kualitas audit 4,030 adalah lebih kecil. Hal

ini mengindikasikan variabel variabel independen lebih baik dalam memprediksi variasi dependen kualitas audit daripada rata-rata kualitas audit itu sendiri.

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,396 ^a	,157	,104	3,815	1,931

Sumber : Data primer diolah, 2014

4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Dari hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau *F test* seperti yang ditampilkan pada tabel 4.10 di bawah ini diperoleh nilai *F*-hitung sebesar 2,974 dengan probabilitas 0,065. Karena probabilitas lebih besar dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa *Fraud Risk Assessment* dan Kecakapan Auditor inspektorat tidak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	86,537	2	43,269	2,974	,065 ^b
Residual	465,634	32	14,551		
Total	552,171	34			

Sumber : Data primer diolah, 2014

Secara lebih tepat, nilai *F*hitung dibandingkan dengan *F*-tabel dimana jika *F*-hitung > *F*-tabel maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada taraf $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan pembilang/df1 (k)=2 (jumlah variabel independen) dan derajat kebebasan penyebut/df2 ($n-k-1$)=32, diperoleh nilai *F*-tabel 3,29. Dengan

demikian, nilai F-hitung 2,974 lebih kecil dari nilai F-tabel 3,29. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Variabel *Fraud Risk Assesment* dan Kecakapan Auditor tidak secara simultan mempengaruhi variabel kualitas audit.

4.2.4.3 Uji Parsial (Uji t)

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa *Fraud Risk Assesment* berpengaruh terhadap kualitas audit tidak dibuktikan pada tabel 4.11. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel *Fraud Risk Assesment* (X1) adalah 0,011 dan nilai thitung 0,088. Nilai koefisien regresi ini tidak signifikan pada tingkat 0,05 dengan *p value* sebesar 0,931.

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24,153	4,085		5,913	,000
1 X1	,011	,122	,016	,088	,931
X2	,271	,130	,388	2,074	,046

Sumber : Data primer diolah, 2014

Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai t hitung dan t tabel. Nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) $n-k-1 = 32$ adalah 2,036. Dengan demikian, nilai t hitung $0,088 < t$ tabel 2,036. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel *Fraud Risk Assesment* aparat inspektorat tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain H1 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan bahwa Kecakapan Auditor inspektorat berpengaruh terhadap kualitas audit dibuktikan pada tabel

4.11. Ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kecakapan auditor inspektorat (X2) adalah 0,271 dan nilai t hitung 2,074. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* sebesar 0,046. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel independensi aparat inspektorat (X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Hasil ini diperkuat dengan hasil perhitungan nilai t hitung dan t tabel. Nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) $n-k-1 = 32$ adalah 2,036. Dengan demikian, nilai t hitung $2,074 > t \text{ tabel } 2,036$, sehingga perubahan atau variasi variabel Kecakapan auditor diikuti oleh variasi kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian H2 ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel kecakapan auditor inspektorat berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain H2 diterima.

4.3 Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis Hasil	Hasil
H ₁	Fraud Risk Assesment tidak berpengaruh sterhadap kualitas audit	Ditolak
H ₂	Kecakapan Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit	Diterima
H ₃	Fraud risk assesment dan Kecakapan Auditor secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit	Ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2014

4.3.1 Pengaruh *Fraud Risk Assesment* terhadap Kualitas Audit

Hipotesis Hasil pertama menyatakan bahwa *Fraud Risk Assesment* berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit. Hasil pengujian statistik

menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel *Fraud Risk Assesment* adalah 0,011. Nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0,931. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai t hitung $0,088 < t$ tabel 2,036. Hal ini menunjukkan bahwa *Fraud Risk Assesment* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hipotesis pertama penelitian ini tidak berhasil dibuktikan, diduga karena daya skeptis yang dimiliki Aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendeteksi indikasi fraud masih belum sesuai standar. Hasil berbeda diungkapkan dalam penelitian Prasetyani (2012) yang menyatakan *Fraud Risk Assesment* aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu sebesar 14 %, sedangkan sisanya sebesar $(100 \% - 14 \% = 86 \%)$ dipengaruhi oleh variabel lain.

Penelitian Beasley (2001) yang didasarkan pada AAERs (*Accounting and Auditing Releases*) yang telah dikutip oleh Noviyanti (2008) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor. Pernyataan ini didukung oleh Carpenter, Durtschi dan Gaynor (2002) yang mengungkapkan bahwa jika auditor lebih skeptis, mereka akan mampu lebih menaksir keberadaan kecurangan pada tahap perencanaan audit, yang akhirnya akan mengarahkan auditor untuk meningkatkan pendeteksian kecurangan pada tahap-tahap audit berikutnya.

Gusti dan Ali (2008) dalam penelitiannya menambahkan bahwa dengan sikap skeptisme profesional auditor ini, auditor seharusnya dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan, serta menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit tetap terjaga.

4.3.2 Pengaruh Kecakapan Auditor terhadap Kualitas Audit

Hipotesis Hasil kedua menyatakan bahwa Kecakapan Auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Kecakapan Auditor adalah 0,271. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0,046. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai t hitung $2,074 > t$ tabel 2,036. Hal ini menunjukkan bahwa kecakapan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil berbeda diungkapkan dalam penelitian Prasetyani (2012) yang menyatakan Pengaruh kecakapan auditor aparat pengawasan terhadap kualitas audit yaitu sebesar 0,00 %, yang artinya tidak ada pengaruh antara kecakapan auditor terhadap kualitas audit aparat inspektorat.

Hasil Penelitian Choo dan Trotman (2001) dalam Batubara (2010) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum (*atypical*) dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman. Hal ini selaras dengan penelitian Tubbs (1992) yang menemukan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin banyak kesalahan yang dapat ditemukan oleh auditor.

Hasil penelitian Batubara (2008) yang menemukan bahwa pendidikan profesional berkelanjutan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Namun, penelitian ini juga menghasilkan koefisien yang positif yang artinya pendidikan profesional berkelanjutan meningkatkan kualitas audit. Dalam SPKN disebutkan bahwa pemeriksa harus menguasai perkembangan mutakhir dalam metodologi dan standar pemeriksaan sampai memahami analisis laporan keuangan dan analisis statistik. Untuk dapat mencapai hal tersebut, setiap 2 tahun pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan; dimana 24 jam dari 80 jam pendidikan tersebut harus dalam hal yang berhubungan langsung dengan

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dalam penelitian ini, jumlah pelatihan digunakan sebagai proksi pendidikan profesional berkelanjutan, karena peneliti tidak dapat mengklasifikasikan jenis pelatihan juga jam pelatihan yang telah ditempuh. Ketidaktepatan pengukuran variabel ini dapat berakibat pada tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antara kecakapan profesional dengan kualitas audit.

4.3.3 Pengaruh Fraud Risk Assesment dan Kecakapan Auditor terhadap Kualitas Audit

Hipotesis Hasil Ketiga menyatakan bahwa *Fraud Risk Assesment* dan Kecakapan Auditor tidak secara simultan mempengaruhi variabel kualitas audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai F-hitung sebesar 2,974 dengan probabilitas 0,065. Karena probabilitas lebih besar dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi kualitas audit, dengan demikian nilai F-hitung 2,974 lebih kecil dari nilai F-tabel 3,29. Hasil berbeda diungkapkan dalam penelitian Prasetyani (2012) yang menyatakan besarnya pengaruh *Fraud Risk assesment* dan Kecakapan Auditor aparat pengawasan secara simultan terhadap Kualitas Audit adalah sebesar 11,9 % dan sisanya ($100\% - 11,9\% = 88,1\%$) dipengaruhi oleh variabel lain. Faktor yang menyebabkan perbedaan hasil ini mungkin dari sudut pandang pemeriksa yang dipengaruhi oleh faktor budaya etnis, budaya organisasi dan karakter.

Perlu disarankan penentu kebijakan untuk meningkatkan *Fraud Risk Assesment* Inspektorat melalui pemberian pelatihan dan mengasah keakuratan sikap kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian intern dengan melakukan serangkaian pengujian (*test*) untuk menemukan indikator terjadinya fraud, sehingga diharapkan kualitas audit yang dihasilkan

oleh aparat Inspektorat dapat semakin baik. Selain itu penentu kebijakan perlu mengetahui hal apa saja yang bisa menaikkan kecakapan auditor aparat Inspektorat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Fraud Risk Assesment* dan Kecakapan Auditor tidak secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. *Fraud Risk Assesment* berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit, sehingga Pendidikan dan Sikap Skeptik sebagai auditor yang dimiliki aparat inspektorat tidak menjamin apakah yang bersangkutan dapat mendeteksi indikasi fraud yang akan terjadi. Hipotesis pertama penelitian ini tidak berhasil dibuktikan, diduga karena daya skeptis yang dimiliki Aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendeteksi indikasi fraud masih belum sesuai standar.
3. Kecakapan Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik tingkat Kecakapan Auditor, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya sebaliknya apabila kecakapan seorang auditor rendah maka mengakibatkan buruknya kualitas audit yang dilakukannya. Hal ini didukung oleh pengetahuan, perilaku, pendidikan dan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas.

5.2 Saran

Dengan segala keterbatasan, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Menambah jumlah sampel yang diteliti dan memperluas lokasi penelitian sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat.
2. Menambah variabel lain seperti lain seperti moderating, intervening, maupun variabel independen seperti kinerja, loyalitas, independensi, Pendidikan, dan kecermatan profesional yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap kualitas auditor.
3. Agar peneliti selanjutnya menggunakan data sekunder sebagai data penelitian seperti laporan hasil audit.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya melibatkan pada satu institusi saja, yaitu Inspektorat Sulawesi Tenggara, sehingga tingkat generalisasi dari penelitian masih kurang, dan kesimpulan yang diambil mungkin hanya berlaku pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan tidak dapat digeneralisasikan ke Inspektorat se Indonesia.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang tidak cermat, tidak serius, dan responden yang menjawab asal – asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami responden.
3. Variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruhnya terhadap kualitas auditor pada penelitian ini, hanya sebatas pengaruh *Fraud risk assesment* dan kecakapan auditor. Seharusnya ditambahkan variabel lain yang dapat diuji terhadap kualitas audit.

DAFTAR PUSTAKA

- AAA *Financial Accounting Standard Committee*. 2000. Commentary: SEC Auditor Independence Requirements. *Accounting Horizons*, Vol. 15, No.4 December 2001, 373-386.
- Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
- AICPA, SAS No.99. 2002. *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. New York: AICPA.
- Albrecht, 2006. *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*. New Jersey: Jhon Wailey & Sons Inc.
- Amrizal, 2004. *Pencegahan dan pendeteksian kecurangan oleh auditor internal*. Jakarta.
- Arens, Alvin A., James, L. Loebbecke. 2008. *Auditing Pendekatan Terpadu*, Terjemahan oleh Amir Abadi Yusuf, Buku Dua, Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, Alvin A., Mark, Randal. 2003. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi*, Edisi Kesembilan, Jilid 2, Alih Bahasa oleh Amir Abadi Yusuf. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). 2005. *Report to the nations on Occupational Fraud and Abuse*.
- Bastian Indra, 2003. *Audit Sektor Publik*. Visi Global Media
- Batubara, Rizal Iskandar. 2008. *Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Bawasko Medan)*. Tesis. Medan: Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Boynton, W.C., Johnson.R.N., Kell, W.G. (2003). *Modern Auditing jilid 1 (edisi 7)*. (alih bahasa: Paul A.Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi). Jakarta: Penerbit Erlangga
- Cahyat, A. 2004. *Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten*. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. Governance Brief Number 3

- Christiawan, Yulius Jogi. 2003. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Akuntansi dan Keuangan* Vol.4 No. 2 (Nov) 79-9.
- Carpenter, Tina, Cindy Durtschi, dan Lisa Milici Gaynor. 2002. *The Role of Experience in Professional Skepticism, Knowledge Acquisition, and Fraud Detection*.
- Darwis, Ulfia. 2014. *Pengaruh Independensi, Kecakapan Profesional, dan Kepatuhan Kepada Kode Etik terhadap Kualitas Kerja Auditor*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- DeAngelo, L.E. 1981. Auditor Size and audit quality. *Journal of Accounting & Economics*, 183-199.
- Effendy, M. Taufiq. 2010. *Pengaruh kompetensi independensi dan motivasi terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah*. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Iman. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi 3. Semarang: BP Undip.
- Gusti, Maghrifah., Ali, Syahrul. 2008. *Hubungan Skeptisme Profesional Auditor dan Situasi Audit, Etika, Pengalaman serta Keahlian Audit dengan Ketepatan Pemberian Opini Auditor oleh Akuntan Publik*. Simposium Nasional Akuntansi. Vol. XI.
- Halim, Abdul. 2003. *Auditing 1: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Harhinto, Teguh. 2004. *Pengaruh Keahlian dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris Pada KAP di Jawa Timur*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- International Federation of Accountants (IFAC). 2007. *Guide to Using International standards on Auditing in the Audits of small and Medium-sized Entities*. New York: IFAC.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrijawati, Aini. 2013. *Audit Expectation Gap Pada Sektor Publik*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Jones, P.C., Bates, J. G. 1990. *Public sector Auditing: Practical Techniques for an Integrated Approach*. London: Chapman & Hall.

- Kharismatuti, Norma, dan Hadiprajitno. 2012. *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*, Buku Dua (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Noviyanti, Suzy. 2008. Skeptisme Profesional Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5: 102-125.
- Nurharyanto – Widyaiswara, 2010. *Pentingnya Penilaian Resiko Fraud oleh auditor internal audit dalam rangka mendukung penerapan program Anti – Fraud dalam sektor Publik*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.*
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).*
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.*
- Prasetyani, Yunita Nurfajri. 2012. *Pengaruh Fraud Risk Assesment dan Kecakapan Auditor terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan Jepara*. Kudus: Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- Purbayu, Santosa, Budi., dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Rahman, A. T. 2009. *Persepsi Auditor Mengenai Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Due Professional Care terhadap Kualitas Audit*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Rasuman. 2011. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, Independensi, Kepatuhan pada Kode Etik Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengalaman Kerja sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sembiring, Andi Yahya. 2014. *Pengaruh Pengalaman dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal Inspektorat Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Sudarmo. 2009. *Fraud Auditing*. Diklat Perjenjangan Auditor Ketua Tim, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Suprajadi, Lusy. 2009. *Teori Kecurangan, Fraud Awaeness, dan Metodologi untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 13 (2): 52-58.
- Susmanto, Bintang. 2008. *Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat*, (Online), (<http://www.menkokesra.go.id/>).
- Tata Kelola Pemerintah yang Bersih. *Jurnal Ekonomi Manajemen vol.5 No.4. September 2010*. Kuningan : Universitas Kuningan.
- Taufik, Mochammad. 2008. *Pengaruh Pengalamn Kerja dan Pendidikan Profesi Auditor Internal Terhadap Kemampuan Mendeteksi Fraud*. Skripsi. Jakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2007. Pengungkapan Fraud di Lembaga Negara (Tinjauan Teknik Audit). *Economic Business & Accounting Review*, Vol. II, No.1, 10-21.
- Tubbs, Richard M. 1992. The Effect of Experience on the Auditor's Organization and Amount of Knowledge, *The Accounting Review*, 783-801.
- Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. 2007. *Dasar-dasar Auditor Internal Sektor publik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. 2004. (Online), (<http://www.kemenag.go.id/>).

LAMPIRAN

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Yeheskhiel Sesario Mangiri
 Tempat, Tanggal lahir : Kendari, 8 Januari 1992
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat Rumah : Jln. Perintis Kemerdekaan 8 No.8 Lrg 3,
 Tamalanrea, Makassar
 Telepon Rumah dan HP : 081342331258
 Alamat E-mail : sesarioyeheskhiel@rocketmail.com

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal

- | | |
|---|-----------------|
| 1. SD Negeri 15 Katobu Raha | Tahun 1997-2003 |
| 2. SMP Negeri 1 Kendari | Tahun 2003-2006 |
| 3. SMA Kartika Wirabuana VII-2 Kendari | Tahun 2006-2009 |
| 4. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin – Makassar | Tahun 2009-2015 |

- Pendidikan Nonformal

Riwayat Prestasi

- Prestasi Akademik
- Prestasi Nonakademik

Pengalaman

- Organisasi
- Kerja

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 15 Februari 2015

Yeheskhiel Sesario Mangiri
A31109115

KUESIONER PENELITIAN

Makassar, 18 Mei 2014

Kepada Yth :
Responden
Di tempat

Bersama ini saya :

Nama : Yeheskhiel Sesario Mangiri

NIM : A31109115

Status : Mahasiswa Strata 1 (S-1), Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi,
Universitas Hasanuddin

Dalam rangka untuk penelitian skripsi program sarjana (S-1), Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanuddin, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul ***"Pengaruh Fraud Risk Assesment dan Kecakapan Auditor Terhadap Kualitas Audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada Kantor Inspektorat Sulawesi Tenggara"***.

Untuk itu Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan.

Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui sesuai dengan etika dalam penelitian, data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian. Saya harap Bapak/Ibu/Saudara/i dapat mengembalikan kuesioner secepatnya setelah kuesioner tersebut diterima.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Yeheskhiel Sesario Mangiri

Daftar pertanyaan berikut terdiri dari tipe isian dan tipe pilihan. Pada tipe isian, mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi jawaban pada tempat jawaban yang telah disediakan dengan singkat dan jelas, dan pada tipe pilihan berilah tanda *tick mark* (✓) pada pilihan jawaban yang tepat pada pertanyaan berikut ini:

1. Nama :
2. Umur : tahun
3. Jenis Kelamin : (a) Pria (b) Wanita
4. Masa Kerja : tahun
5. Golongan :
6. Pendidikan terakhir :
7. Pendidikan dan pelatihan tentang audit yang pernah diikuti:kali

Sebutkan:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Cara pengisian kuesioner :

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan pendapat mengenai adanya indikasi kecurangan (*fraud*) terhadap kasus-kasus di bawah ini. Berikan tanda check list (✓) pada skala pengukuran yang sesuai dengan pendapat anda. Angka 1 berarti tidak adanya indikasi fraud dan semakin mendekati angka 5 berarti ditemukan adanya indikasi fraud.

DAFTAR KUESIONER UNTUK VARIABEL FRAUD RISK ASSESMENT

1. PT.Taman Kota, sebuah perusahaan distributor buku-buku agama, mempunyai 4 orang staf administrasi yang tersebar di 4 cabang di kota Bandung. Perusahaan mempunyai prosedur kas kecil (*petty cash*) untuk masing-masing staf administrasinya di cabang dengan mencadangkan nominal sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulannya. Dalam hal ini 4 staf tersebut diberi wewenang untuk mempergunakan kas kecil tersebut dalam transaksi harian. Sebagai pertanggungjawaban staf berkewajiban untuk menunjukkan bukti pemakaian kas kecil (misal: nota foto kopi, nota pembelian alat tulis) pada akhir bulan.

Menurut saya :

Skala Pengukuran						
Tidak ada indikasi fraud	1	2	3	4	5	Ada indikasi fraud

2. PT. Rumah Manis adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. Dalam pelaksanaan operasinya perusahaan mencadangkan sejumlah dana untuk biaya pemeliharaan mesin. Perusahaan mempercayakan penuh hal ini kepada seorang staf ahli mesinnya. Perusahaan melalui staf keuangan tinggal mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pemeliharaan mesin sesuai dengan instruksi sang staf ahli mesin. Selama ini perusahaan merasa terbantu akan keberadaan staf tersebut.

Menurut saya :

Skala Pengukuran						
Tidak ada indikasi fraud	1	2	3	4	5	Ada indikasi fraud

3. Dalam prosedur penerimaan karyawan PT. Taman Surga, dewan direksi memberi wewenang penuh kepada manajer pengembangan sumber daya perusahaan (HRD) untuk menyeleksi penerimaan karyawan baru. Dewan direksi sangat mempercayai kinerjanya selama ini, karena para pekerja baru yang masuk dirasa sangat cakap dan dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Dewan direksi merasa manajer HRD-lah yang lebih paham tentang kebutuhan karyawan bagi perusahaan karena sehari-harinya berada di lapangan.

Menurut saya :

Skala Pengukuran						
Tidak ada indikasi fraud	1	2	3	4	5	Ada indikasi fraud

4. PT. Kesehatan adalah sebuah apotik berskala besar yang menjual obat-obat kesehatan. Karena perputaran transaksi obat yang cepat, perusahaan menyimpan persediaan obat yang di kirim distributor di gudang. Perusahaan sangat mengutamakan efisiensi, diantaranya dengan menjadikan 2 dari 5 apotekernya merangkap sebagai pengontrol persediaan obat di gudang. Prosedur pembelian, pelunasan dan pemusnahan obat-obat kadaluwarsa menjadi wewenang 2 apotekernya tersebut. Pimpinan perusahaan merasakan efisiensi ini sangat tepat untuk keberlangsungan apotiknya.

Menurut saya :

Skala Pengukuran						
Tidak ada indikasi fraud	1	2	3	4	5	Ada indikasi fraud

5. PT. Rumah Damai mempunyai seorang karyawan yang bertugas sebagai penerima dan pencatat piutang pelanggan yang bernama Hate, SE. Ia merupakan karyawan yang kompeten sehingga mampu untuk menangani berbagai masalah dengan pelanggan dan sebagainya. Tugasnya adalah menerima setoran dan mencatatnya ke dalam buku penerimaan kas. Di samping itu ia juga dipercaya untuk mengotorisasi dan menghapuskan piutang tak tertagih pelanggan. Pemimpin perusahaan sangat senang dengan sistem ini, karena alasan efisiensi.

Menurut saya :

Skala Pengukuran						
Tidak ada indikasi fraud	1	2	3	4	5	Ada indikasi fraud

6. PT. Langit Cerah yang terdiri dari induk-cabang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi pengangkutan hasil laut. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, perusahaan mempunyai prosedur yang mengalokasikan sejumlah dana untuk meremajakan kendaraan-kendaraan angkut yang telah digunakan dalam jangka waktu periode tertentu. Selama ini kantor pusat mempercayakan hal ini kepada pimpinan cabang yang ada di pantai Pangandaran, karena sangat mengetahui kondisi langsung di lapangan. Selama ini pelanggan merasa puas dengan pelayanan jasa angkut PT. Yang dikenal profesional dan tepat waktu.

Menurut saya :

Skala Pengukuran						
Tidak ada indikasi fraud	1	2	3	4	5	Ada indikasi fraud

7. PT. Semangat Hidup adalah perusahaan furnitur yang masih berskala menengah. Perusahaan tersebut mempunyai seorang staf administrasi yang diberi wewenang untuk memberikan diskon kepada pembeli. Dia juga merangkap sebagai staf penawar harga dan penerima kas. Pada saat penjualan kredit, di dalam formulir penjualan tidak dicantumkan diskon penjualan, tanggal jatuh tempo dan denda.

Menurut saya :

Skala Pengukuran						
Tidak ada indikasi fraud	1	2	3	4	5	Ada indikasi fraud

Cara Pengisian Kuesioner:

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan jawaban yang sesuai atas pertanyaan pertanyaan berkenaan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda *tick mark* (✓). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang paling tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban adalah sebagai berikut:

- Sangat sering Skor 5
- Sering Skor 4
- Pernah Skor 3
- Hampir tidak pernah Skor 2
- Tidak pernah Skor 1

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KECAKAPAN AUDITOR

No	PERNYATAAN	NILAI				
		SS	S	P	HTP	TP
1.	Apakah anda sudah pernah mengikuti <i>training</i> akuntansi					
2.	Apakah anda sudah pernah mengikuti <i>training</i> mengenai audit (pemeriksaan)					
3.	Dalam memberikan pendapat /rekomendasi, apakah anda lebih dahulu melakukan prosedur investigasi yang sesuai dengan proses audit ?					
4.	Apakah anda selalu memiliki sikap kehati-hatian profesional yaitu merencanakan dan mengawasi secara seksama (selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit)					
5.	Apakah anda memiliki kemampuan berkomunikasi, kreativitas kemampuan bekerjasama dengan orang lain?					
6.	Pengalaman dalam melakukan pemeriksaan sebelumnya					
7.	Apakah anda memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas dan mampu menangani ketidakpastian					
8.	Apakah anda menggunakan ilmu statistik dalam Pemeriksaan					
9.	Apakah anda melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat					

Cara Pengisian Kuesioner :

Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda *tick mark* (✓) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap Tanda akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Silahkan memberikan jawaban anda pada pilihan jawaban yang tersedia:

1. **SS** : jika pernyataan tersebut **SANGAT SESUAI** dengan diri Anda
2. **S** : jika pernyataan tersebut **SESUAI** dengan diri Anda
3. **N** : **NETRAL**
4. **TS** : jika pernyataan tersebut **TIDAK SESUAI** dengan diri Anda
5. **STS** : jika pernyataan tersebut **SANGAT TIDAK SESUAI** dengan diri Anda

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KUALITAS AUDIT

No	INDIKATOR	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Keakuratan Temuan Audit	Saya menjamin temuan audit saya akurat. Saya bisa menemukan sekecil apapun kesalahan / penyimpangan yang ada					
2.		Saya tidak pernah melakukan rekayasa. Temuan apapun saya laporkan apa adanya					
3.	Sikap Skeptis	Saya percaya pada auditee saya kali ini tidak akan saya temui kesalahan / penyimpangan. Sebab sebelumnya saya pernah mengaudit auditee yang sama dan waktu itu tidak ada temuan					
4.	Nilai Rekomendasi	Rekomendasi yang saya berikan dapat memperbaiki penyebab					

		dari kesalahan / penyimpangan yang ada					
5.	Kejelasan Laporan	Laporan hasil audit saya dapat dipahami oleh <i>auditee</i>					
6.	Manfaat Audit	Audit yang saya lakukan akan dapat menurunkan tingkat kesalahan / penyimpangan yang selama ini terjadi					
7.	Tindak Lanjut Hasil Audit	Hasil audit saya dapat ditindaklanjuti oleh <i>auditee</i>					
8.		Saya terus memantau tindak lanjut hasil audit					

OUTPUT SPSS PROFIL RESPONDEN

Frequency Table

		Gender			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PRIA	21	60.0	60.0	60.0
	WANITA	14	40.0	40.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

		Tingkat Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 30 Tahun	3	8.6	8.6	8.6
	30 - 40 Tahun	11	31.4	31.4	40.0
	41 - 50 Tahun	7	20.0	20.0	60.0
	> 50 Tahun	14	40.0	40.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

		Tingkat Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Strata 1	22	62.9	62.9	62.9
	Strata 2	13	37.1	37.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

		Golongan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	III a	6	17.1	17.1	17.1
	III b	5	14.3	14.3	31.4
	III c	8	22.9	22.9	54.3
	III d	7	20.0	20.0	74.3
	IV a	3	8.6	8.6	82.9
	IV b	6	17.1	17.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Masa Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 10 Tahun	14	40.0	40.0	40.0
10 - 20 Tahun	6	17.1	17.1	57.1
21 - 30 Tahun	10	28.6	28.6	85.7
> 30 Tahun	5	14.3	14.3	100.0
Total	35	100.0	100.0	

HASIL DATA KUESIONER

Hasil Kuesioner Variabel Fraud Risk Assesment X1

Responden	Pertanyaan							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	4	4	5	4	4	1	3	25
2	4	5	3	5	5	4	4	30
3	5	1	5	1	5	5	3	25
4	1	1	2	2	4	3	3	16
5	3	3	2	3	3	3	4	21
6	2	2	3	3	2	3	4	19
7	2	1	1	2	3	2	4	15
8	1	1	2	2	4	3	3	16
9	3	3	3	2	3	2	3	19
10	4	3	2	4	4	3	4	24
11	1	5	1	5	5	1	5	23
12	4	2	3	4	3	3	4	23
13	1	3	3	4	4	2	5	22
14	4	4	5	5	5	5	5	33
15	3	4	3	3	5	3	4	25
16	4	4	3	3	4	4	4	26
17	3	4	5	5	5	5	5	32
18	5	4	3	2	5	5	5	29
19	5	5	5	5	5	5	5	35
20	5	5	4	4	5	4	5	32
21	5	5	4	4	5	4	5	32
22	5	5	4	5	5	4	5	33
23	5	5	5	5	5	5	3	33

24	5	5	4	4	5	5	4	32
25	5	5	5	5	5	5	5	35
26	5	5	5	5	5	5	5	35
27	4	4	4	4	2	4	4	26
28	4	5	5	5	5	5	4	33
29	4	4	5	5	5	4	4	31
30	5	5	5	5	5	5	5	35
31	5	4	5	5	5	5	5	34
32	4	5	4	4	5	4	4	30
33	5	5	5	5	5	5	5	35
34	4	4	5	5	4	5	4	31
35	5	5	4	4	5	3	5	31

Hasil Kuesioner Variabel Kecakapan Auditor X2

Responden	Pertanyaan									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	3	5	5	5	3	5	3	4	34
2	5	5	4	4	4	5	4	3	5	39
3	3	3	4	4	3	3	4	2	3	29
4	2	1	1	4	4	2	4	2	3	23
5	1	3	1	5	5	3	4	3	3	28
6	3	3	4	4	4	4	4	3	3	32
7	3	4	4	4	5	2	4	3	5	34
8	1	1	5	5	5	4	2	2	4	29
9	4	4	4	3	4	3	4	3	3	32
10	1	1	3	3	4	1	4	3	3	23
11	2	2	4	4	3	3	4	3	4	29
12	3	4	4	5	5	5	5	2	4	37
13	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
14	3	3	3	3	4	4	4	3	4	31
15	3	3	3	3	4	3	4	2	4	29
16	3	3	5	5	5	5	5	3	4	38
17	5	3	3	5	4	4	3	4	2	33
18	3	3	5	5	4	4	4	4	3	35
19	3	3	3	3	4	4	2	3	4	29
20	3	3	3	3	5	4	5	3	4	33
21	2	2	5	2	4	5	2	3	5	30
22	3	3	3	5	5	5	5	2	4	35
23	5	5	4	3	4	5	5	5	4	40
24	4	5	5	4	5	5	5	4	4	41
25	3	4	3	3	4	3	4	3	5	32

27	4	4	4	4	3	4	5	4	32
28	4	3	3	4	3	5	3	3	28
29	5	5	5	5	3	5	3	4	35
30	4	5	5	4	4	4	4	4	34
31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	5	4	4	4	4	5	4	4	34
33	4	5	4	5	4	5	4	4	35
34	5	5	5	5	5	5	5	5	40
35	5	5	5	5	5	5	5	5	40

HASIL UJI KUALITAS DATA

1. OUTPUT SPSS UJI VALIDITAS

a. Variabel Fraud Risk Assesment

		Correlations							Total
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	
X1.1	Pearson	1	,603**	,707**	,382*	,466*	,681**	,312	,812**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,023	,005	,000	,068	,000
X1.2	N	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson	,603*	1	,514**	,764*	,594*	,393*	,565*	,839**
	Correlation								
X1.3	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,000	,000	,020	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson	,707*	,514**	1	,541*	,464*	,697**	,222	,811**
X1.4	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,000	,002		,001	,005	,000	,200	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
X1.5	Pearson	,382*	,764**	,541**	1	,428*	,357*	,552*	,757**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,023	,000	,001		,010	,035	,001	,000
X1.6	N	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson	,466*	,594**	,464**	,428*	1	,484**	,408*	,704**
	Correlation								
X1.7	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,005	,010		,003	,015	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson								

Pearson										
Correlation	,562**	,460**	,471**	,171	,348*	1	,188	,498**	,418*	,729**
Sig. (2-tailed)	,000	,005	,004	,327	,040		,279	,002	,012	,000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Pearson										
Correlation	,258	,502**	,194	,347*	,463**	,188	1	,286	,169	,567**
Sig. (2-tailed)	,135	,002	,265	,041	,005	,279		,095	,331	,000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Pearson										
Correlation	,577**	,567**	,361*	,103	,217	,498**	,286	1	,350*	,710**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,033	,555	,211	,002	,095		,039	,000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Pearson										
Correlation	,304	,443**	,447**	,038	,379*	,418*	,169	,350*	1	,590**
Sig. (2-tailed)	,076	,008	,007	,828	,025	,012	,331	,039		,000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Pearson										
Correlation	,733**	,790**	,636**	,437**	,540**	,729**	,567*	,710**	,590**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,009	,001	,000	,000	,000	,000	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Kualitas Audit

		Correlations								
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Total
Y1	Pearson	1	,234	,279	,488**	,175	,507**	,172	,252	,589**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)									
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y2	Pearson	,234	1	,416*	,515**	,234	,329	,391*	,283	,689**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)									
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y3	Pearson	,279	,416*	1	,137	,163	,132	,219	,352*	,585**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)									

Y4	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson									
	Correlation	,488**	,515*	,137	1	,364*	,717**	,228	,420*	,719**
Y5	Sig. (2-tailed)	,003	,002	,433		,032	,000	,188	,012	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson									
Y6	Correlation	,175	,234	,163	,364*	1	,290	,374*	,474**	,579**
	Sig. (2-tailed)	,316	,177	,349	,032		,091	,027	,004	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y7	Pearson									
	Correlation	,507**	,329	,132	,717**	,290	1	,040	,278	,610**
	Sig. (2-tailed)	,002	,053	,451	,000	,091		,820	,106	,000
Y8	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson									
	Correlation	,172	,391*	,219	,228	,374*	,040	1	,743**	,619**
Y8	Sig. (2-tailed)	,324	,020	,205	,188	,027	,820		,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Pearson									
Total	Correlation	,252	,283	,352*	,420*	,474*	,278	,743*	1	,732**
	Sig. (2-tailed)	,144	,100	,038	,012	,004	,106	,000		,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Total	Pearson									
	Correlation	,589**	,689*	,585**	,719**	,579*	,610**	,619*	,732**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		
Total	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. OUTPUT SPSS UJI RELIABILITAS

a. Variabel Fraud Risk Assesment

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,873	,874	7

Inter-Item Correlation Matrix

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7
X1.1	1,000	,603	,707	,382	,466	,681	,312
X1.2	,603	1,000	,514	,764	,594	,393	,565
X1.3	,707	,514	1,000	,541	,464	,697	,222
X1.4	,382	,764	,541	1,000	,428	,357	,552
X1.5	,466	,594	,464	,428	1,000	,484	,408
X1.6	,681	,393	,697	,357	,484	1,000	,309
X1.7	,312	,565	,222	,552	,408	,309	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	24,06	26,232	,713	,697	,847
X1.2	24,03	25,676	,751	,769	,841
X1.3	24,11	26,810	,720	,692	,846
X1.4	23,94	28,173	,653	,708	,855
X1.5	23,49	30,728	,617	,448	,861
X1.6	24,06	27,938	,647	,610	,856
X1.7	23,63	33,005	,500	,425	,874

b. Variabel Kecakapan Auditor

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,819	,820	9

Inter-Item Correlation Matrix

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
X2.1	1,000	,687	,303	,128	,075	,562	,258	,577	,304
X2.2	,687	1,000	,319	,138	,249	,460	,502	,567	,443
X2.3	,303	,319	1,000	,281	,291	,471	,194	,361	,447
X2.4	,128	,138	,281	1,000	,510	,171	,347	,103	,038
X2.5	,075	,249	,291	,510	1,000	,348	,463	,217	,379
X2.6	,562	,460	,471	,171	,348	1,000	,188	,498	,418
X2.7	,258	,502	,194	,347	,463	,188	1,000	,286	,169
X2.8	,577	,567	,361	,103	,217	,498	,286	1,000	,350
X2.9	,304	,443	,447	,038	,379	,418	,169	,350	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	30,71	24,269	,604	,615	,791
X2.2	30,46	23,667	,687	,646	,778
X2.3	30,17	26,617	,505	,358	,803
X2.4	29,94	29,408	,289	,366	,827
X2.5	29,63	29,829	,457	,522	,811
X2.6	30,00	25,471	,622	,499	,788
X2.7	29,89	28,281	,448	,428	,809
X2.8	30,57	26,134	,606	,437	,791
X2.9	29,94	28,585	,490	,419	,806

c. Variabel Kualitas Audit

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,783	,797	8

TABEL FREKUENSI VARIABEL FRAUD RISK ASSESMENT

Statistics									
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Total
N	Valid	35	35	35	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3,83	3,86	3,77	3,94	4,40	3,83	4,26	27,89
Std. Error of Mean		,226	,229	,213	,201	,154	,207	,125	1,039
Median		4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	30,00
Mode		5	5	5	5	5	5	5	35
Std. Deviation		1,339	1,353	1,262	1,187	,914	1,224	,741	6,149
Variance		1,793	1,832	1,593	1,408	,835	1,499	,550	37,810
Skewness		-1,071	-1,085	-,658	-,892	-1,402	-,775	-,460	-,651
Std. Error of Skewness		,398	,398	,398	,398	,398	,398	,398	,398
Kurtosis		,063	,042	-,628	-,309	,979	-,291	-1,005	-,746
Std. Error of Kurtosis		,778	,778	,778	,778	,778	,778	,778	,778
Range		4	4	4	4	3	4	2	20
Minimum		1	1	1	1	2	1	3	15
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	35
Sum		134	135	132	138	154	134	149	976

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	4	11,4	11,4	11,4
2	2	5,7	5,7	17,1
3	4	11,4	11,4	28,6
4	11	31,4	31,4	60,0
5	14	40,0	40,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	4	11,4	11,4	11,4
2	2	5,7	5,7	17,1
3	4	11,4	11,4	28,6

4	10	28,6	28,6	57,1
5	15	42,9	42,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	2	5,7	5,7	5,7
2	4	11,4	11,4	17,1
Valid 3	8	22,9	22,9	40,0
4	7	20,0	20,0	60,0
5	14	40,0	40,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2,9	2,9	2,9
2	5	14,3	14,3	17,1
Valid 3	4	11,4	11,4	28,6
4	10	28,6	28,6	57,1
5	15	42,9	42,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	5,7	5,7	5,7
3	4	11,4	11,4	17,1
Valid 4	7	20,0	20,0	37,1
5	22	62,9	62,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X1.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	5,7	5,7	5,7
2	3	8,6	8,6	14,3
3	8	22,9	22,9	37,1
4	8	22,9	22,9	60,0
5	14	40,0	40,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X1.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	6	17,1	17,1	17,1
4	14	40,0	40,0	57,1
5	15	42,9	42,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Total

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 15	1	2,9	2,9	2,9
16	2	5,7	5,7	8,6
19	2	5,7	5,7	14,3
21	1	2,9	2,9	17,1
22	1	2,9	2,9	20,0
23	2	5,7	5,7	25,7
24	1	2,9	2,9	28,6
25	3	8,6	8,6	37,1
26	2	5,7	5,7	42,9
29	1	2,9	2,9	45,7
30	2	5,7	5,7	51,4
31	3	8,6	8,6	60,0
32	4	11,4	11,4	71,4
33	4	11,4	11,4	82,9

34	1	2,9	2,9	85,7
35	5	14,3	14,3	100,0
Total	35	100,0	100,0	

TABEL FREKUENSI VARIABEL KECAKAPAN AUDITOR

Statistics										
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	Total
N Valid	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
N Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3,20	3,46	3,74	3,97	4,29	3,91	4,03	3,34	3,97	33,91
Std. Error of Mean	,212	,206	,180	,161	,105	,180	,151	,169	,133	,976
Median	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	34,00
Mode	3	3	3	5	4	5	4	3	4	29 ^a
Std. Deviation	1,256	1,221	1,067	,954	,622	1,067	,891	,998	,785	5,772
Variance	1,576	1,491	1,138	,911	,387	1,139	,793	,997	,617	33,316
Skewness	-,023	-,255	-,683	-,156	-,270	-,744	-,853	,368	-,335	,368
Std. Error of Skewness	,398	,398	,398	,398	,398	,398	,398	,398	,398	,398
Kurtosis	-,640	-,504	,570	- 1,493	-,534	,050	,345	-,828	-,304	-,054
Std. Error of Kurtosis	,778	,778	,778	,778	,778	,778	,778	,778	,778	,778
Range	4	4	4	3	2	4	3	3	3	22
Minimum	1	1	1	2	3	1	2	2	2	23
Maximum	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Sum	112	121	131	139	150	137	141	117	139	1187

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	4	11,4	11,4	11,4
2	4	11,4	11,4	22,9
3	16	45,7	45,7	68,6
4	3	8,6	8,6	77,1
5	8	22,9	22,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	3	8,6	8,6	8,6
2	2	5,7	5,7	14,3
Valid 3	16	45,7	45,7	60,0
4	4	11,4	11,4	71,4
5	10	28,6	28,6	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	2	5,7	5,7	5,7
3	13	37,1	37,1	42,9
Valid 4	10	28,6	28,6	71,4
5	10	28,6	28,6	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	2,9	2,9	2,9
3	13	37,1	37,1	40,0
Valid 4	7	20,0	20,0	60,0
5	14	40,0	40,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	3	8,6	8,6	8,6
Valid 4	19	54,3	54,3	62,9
5	13	37,1	37,1	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2,9	2,9	2,9
2	2	5,7	5,7	8,6
3	9	25,7	25,7	34,3
4	10	28,6	28,6	62,9
5	13	37,1	37,1	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X2.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	3	8,6	8,6	8,6
3	4	11,4	11,4	20,0
4	17	48,6	48,6	68,6
5	11	31,4	31,4	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X2.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	7	20,0	20,0	20,0
3	15	42,9	42,9	62,9
4	7	20,0	20,0	82,9
5	6	17,1	17,1	100,0
Total	35	100,0	100,0	

X2.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	2,9	2,9	2,9
3	8	22,9	22,9	25,7

4	17	48,6	48,6	74,3
5	9	25,7	25,7	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Total				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	2	5,7	5,7
	26	1	2,9	8,6
	28	1	2,9	11,4
	29	5	14,3	25,7
	30	1	2,9	28,6
	31	1	2,9	31,4
	32	3	8,6	40,0
	33	3	8,6	48,6
	34	5	14,3	62,9
	35	3	8,6	71,4
	36	1	2,9	74,3
	37	1	2,9	77,1
	38	1	2,9	80,0
	39	1	2,9	82,9
	40	1	2,9	85,7
	41	1	2,9	88,6
	45	4	11,4	100,0
Total	35	100,0	100,0	

TABEL FREKUENSI VARIABEL KUALITAS AUDIT

Statistics									
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Total
N	Valid	35	35	35	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4,23	4,34	3,97	4,14	4,23	4,46	4,20	4,06	33,63
Std. Error of Mean	,124	,153	,176	,110	,124	,125	,135	,123	,681
Median	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	34,00
Mode	4	5	5	4	4	5	4	4	32 ^a
Std. Deviation	,731	,906	1,043	,648	,731	,741	,797	,725	4,030

Variance	,534	,820	1,087	,420	,534	,550	,635	,526	16,240
Skewness	-,389	-1,768	-,601	-,140	-,389	-1,452	-,754	-,578	-,147
Std. Error of Skewness	,398	,398	,398	,398	,398	,398	,398	,398	,398
Kurtosis	-,990	4,102	-,841	-,514	-,990	2,262	,155	,681	-,292
Std. Error of Kurtosis	,778	,778	,778	,778	,778	,778	,778	,778	,778
Range	2	4	3	2	2	3	3	3	16
Minimum	3	1	2	3	3	2	2	2	24
Maximum	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Sum	148	152	139	145	148	156	147	142	1177

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	6	17,1	17,1	17,1
4	15	42,9	42,9	60,0
5	14	40,0	40,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2,9	2,9	2,9
3	4	11,4	11,4	14,3
4	11	31,4	31,4	45,7
5	19	54,3	54,3	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	4	11,4	11,4	11,4
3	7	20,0	20,0	31,4
4	10	28,6	28,6	60,0
5	14	40,0	40,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	5	14,3	14,3	14,3
4	20	57,1	57,1	71,4
5	10	28,6	28,6	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Y5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	6	17,1	17,1	17,1
4	15	42,9	42,9	60,0
5	14	40,0	40,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Y6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	2,9	2,9	2,9
3	2	5,7	5,7	8,6
4	12	34,3	34,3	42,9
5	20	57,1	57,1	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Y7

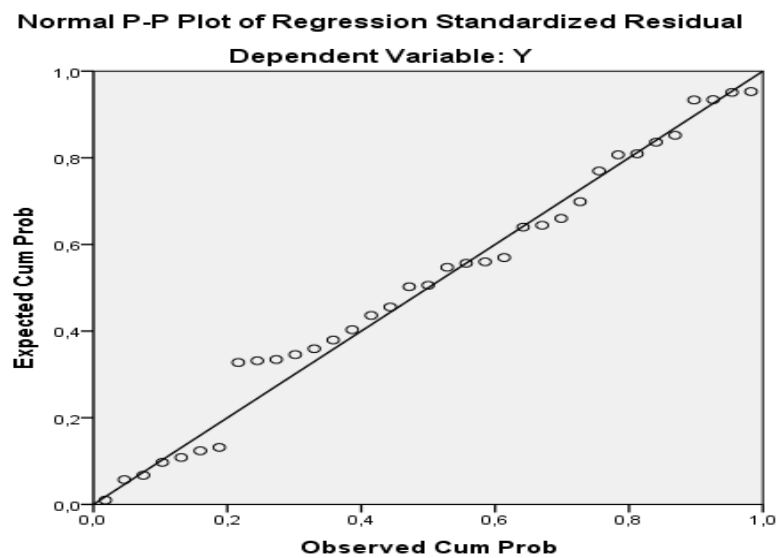
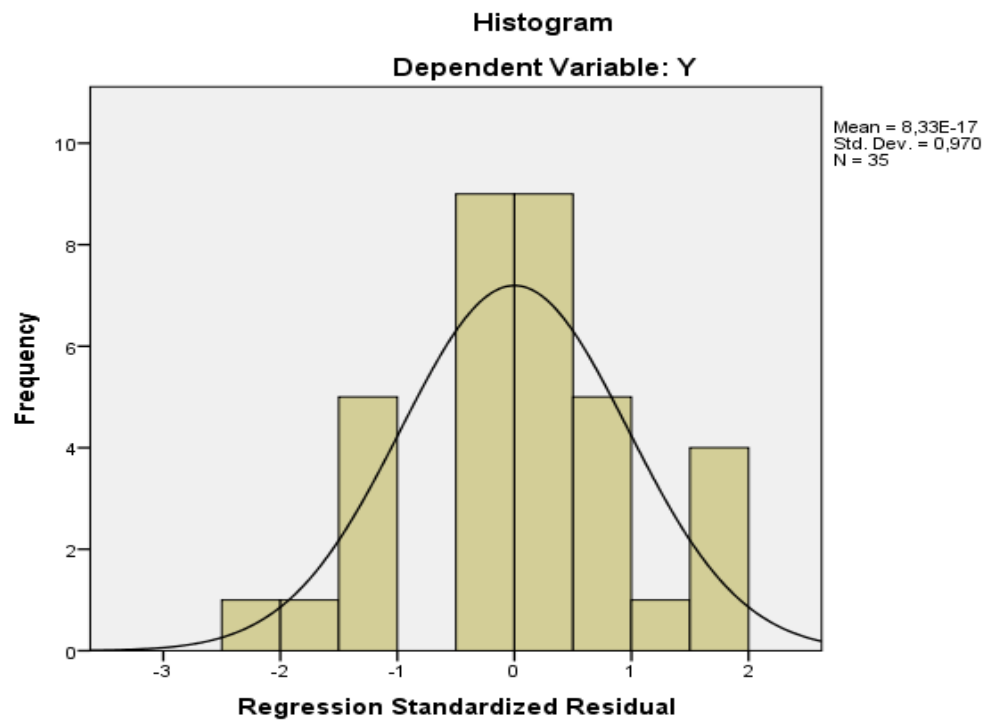
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	2,9	2,9	2,9
3	5	14,3	14,3	17,1
4	15	42,9	42,9	60,0
5	14	40,0	40,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Y8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	2,9	2,9	2,9
3	5	14,3	14,3	17,1
Valid 4	20	57,1	57,1	74,3
5	9	25,7	25,7	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Total

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
24	1	2,9	2,9	2,9
27	1	2,9	2,9	5,7
28	2	5,7	5,7	11,4
29	1	2,9	2,9	14,3
30	2	5,7	5,7	20,0
31	3	8,6	8,6	28,6
32	5	14,3	14,3	42,9
Valid 33	2	5,7	5,7	48,6
34	3	8,6	8,6	57,1
35	4	11,4	11,4	68,6
36	3	8,6	8,6	77,1
37	2	5,7	5,7	82,9
38	1	2,9	2,9	85,7
40	5	14,3	14,3	100,0
Total	35	100,0	100,0	

OUTPUT SPSS UJI ASUMSI KLASIK**1. Hasil Uji Normalitas**

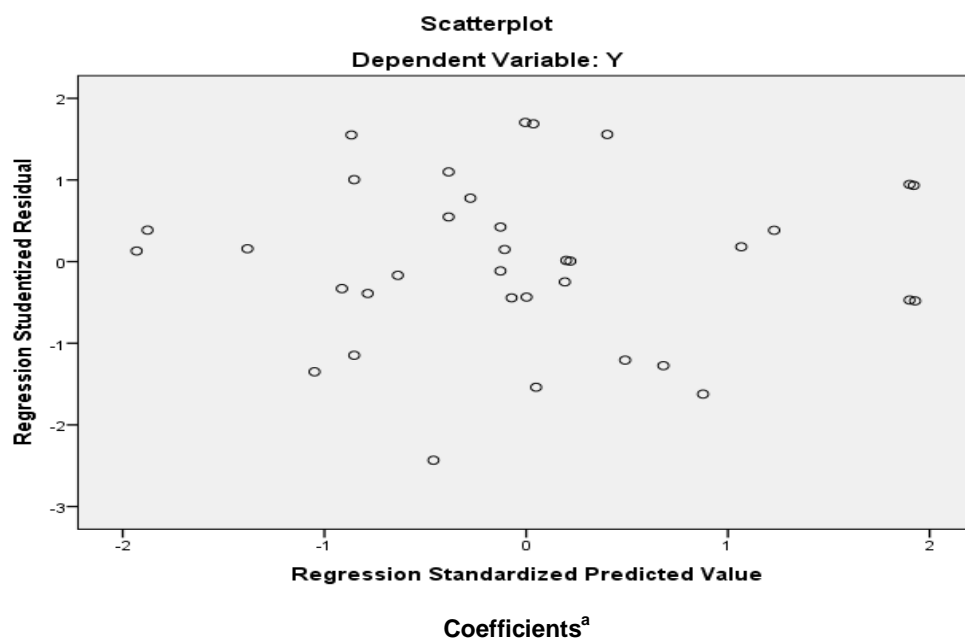
		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	35
	Std. Deviation	0E-7
	Absolute	3,70069215
Most Extreme Differences	Positive	,123
	Negative	,076
Kolmogorov-Smirnov Z		-,123
Asymp. Sig. (2-tailed)		,725
		,669

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	24,153	4,085		5,913	,000		
	X1	,011	,122	,016	,088	,931	,755	1,325
	X2	,271	,130	,388	2,074	,046	,755	1,325

a. Dependent Variable: Y

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	2,181	2,536		,860	,396
1	X1	,001	,076	,003	,016	,987
	X2	,019	,081	,048	,234	,817

OUTPUT SPSS UJI REGRESI (UJI F DAN UJI t)

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,396 ^a	,157	,104	3,815	1,931

a. Predictors: (Constant), X2, X1_a

b. Dependent Variable: Y_b

2. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	86,537	2	43,269	2,974	,065 ^b
1	Residual	465,634	32	14,551		
	Total	552,171	34			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

3. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	24,153	4,085		5,913	,000		
1	X1	,011	,122	,016	,088	,931	,755	1,325
	X2	,271	,130	,388	2,074	,046	,755	1,325

a. Dependent Variable: Y